

PENERBITAN NASKAH SUMBER

**OTONOMI DAERAH
DI
HINDIA BELANDA
1903 - 1940**

PENERBITAN NASKAH SUMBER

**OTONOMI DAERAH
DI
HINDIA BELANDA
1903 - 1940**

CV. SEJAHTERA

Jakarta

1999

TIM PENYUSUN

Nara Sumber : Wahyu Hudoyo
Rusdibjono
JRG. Djopari

Koordinator : Darmiati

Anggota : Langgeng S.B.
Endang Radiani
Ina Mirawati
Majuni Susi
Zita Asih Suprastiwi
Bambang Susilo Rudyoko

*Diterbitkan atas Kerja Sama dengan
Yayasan ADIKARYA IKAPI dan
THE FORD FOUNDATION
dengan ARSIP NASIONAL RI*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN.....	xi
PENGANTAR.....	xiii
PENDAHULUAN.....	xv
BAB I. PARA RAJA YANG TIDAK MERDEKA LAGI (INLANDSCHE ZELFBES- TUUR).....	1
1.1. Surat dari Sekretaris Gubernur Jenderal kepada Dewan Penasehat Hindia Belanda tanggal 17 Juni 1935 No.135/A Rahasia.....	1
1.2. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1936 No. 8.....	2
1.3. Kontrak perjanjian antara Raja Gowa Mangi-mangi KaraEng Bontonompo dengan Pemerintah Kolonial tanggal 31 Desember 1936	5
1.4. Saran dari Departemen Keuangan ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 30 Oktober 1936 No. GT.BX. 12-2-16.....	7
1.5. Permohonan ulang dari Kerajaan Gowa sebagai wilayah yang berpemerintahan sendiri, 1936.....	8

1.6. Konsep perbaikan peraturan otonomi untuk daerah Bali oleh Algemeene Secretarie 1937.....	10
1.7. Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapat tanggal 4 Maret 1937.....	11
1.8. Surat dari Direktur Dalam Negeri kepada Gubernur Jenderal tanggal 3 Mei 1935 No. Bgx 8/3/7 (bijlage : 2 doordrukken).....	15

BAB II. OTONOMI TINGKAT DESA

2.1. Surat dari Direktur Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 28 Oktober 1919 No.12487/Btg.....	21
2.2. Saran dari Dewan Hindia Belanda dan ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 5 Desember 1919.....	22
2.3. Surat dari Residen Palembang ditujukan kepada Direktur Dalam Negeri di Weltevreden tanggal 8 April 1919 No. 5522/27.....	23
2.4. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1927 No.2.....	26
2.5. Surat dari Residen Palembang ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 27 Oktober 1927 No. 11373/28.....	27

	2.6. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 27 Desember 1927 No. 2.	29
BAB III.	DAERAH LOKAL (LOCALE RESSORTEN).....	33
	3.1. Konsep surat keputusan tentang pemilihan anggota Dewan Lokal 1923.....	33
	3.2. Saran dari Dewan Hindia Belanda yang dibawakan dalam rapatnya tanggal 19 Oktober 1917 No. XXI.....	34
	3.3. Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 24 Juni 1918.....	39
	3.4. Memori serah terima jabatan dibuat oleh Residen Palembang A.M. Hens 1923.....	40
	3.5. Saran dari Dewan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal dalam rapat tanggal 7 Maret 1923.....	41
BAB IV.	PERLUNYA DIBENTUK KOTAPRAJA (GEMEENTE)	
	4.1. Surat pengantar dari Walikota Batavia ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 27 Maret 1923 No. 1954.....	43

4.2. Surat dari Komisaris Pemerintah ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1925 No.268.....	44
4.3. Salinan telegram Menteri Koloni untuk kantor Algemeene Secretarie 1925 tentang kelanjutan peraturan posisi kotapraja di wilayah propinsi.....	45
4.4. Telegram dari Menteri Koloni ditujukan kepada kantor Algemeene Secretarie tanggal 10 Desember 1925 No. 751.....	46
4.5. Saran dari Dewan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 18 Agustus 1925.....	47
4.6. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 6 September 1925 No. 5.....	48
4.7. Nota dari Algemeene Secretarie 1923.....	49
4.8. Saran dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 25 Juni 1923 No. 916/2.....	51
4.9. Saran dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 24 Juli 1923 No.1078/2.....	52
4.10.Surat dari Patih Yogyakarta KRA. Danuredjo kepada Residen Yogyakarta tanggal 1 Juli 1905.....	55

4.11. Surat dari Komisaris Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 16 Mei 1905 No. 553a.....	56
4.12. Surat dari Komisaris Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 5 September 1905 No. 752.....	57
4.13. Perubahan peraturan Desentralisasi atas struktur organisasi kotapraja berdasarkan Bestuurshervorming, 1922.....	58
4.14. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 5 Juni 1924 No. 37.....	61
4.15. Peraturan tentang Dewan Kotapraja (memori penjelasan).....	65
4.16. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang peraturan yang berlaku untuk Kotapraja Batavia 1905.....	70
4.17. Surat dari RT. Soeradiningrat ditujukan kepada KRA. Danuredjo patih Yogyakarta tanggal 19 Moeloed Alip 1835 (24 Mei 1905).....	70

BAB V. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DEWAN (KIESRECHT)

5.1. Surat Keputusan Kerajaan Belanda 1923 untuk memperbaiki Surat Keputusan tentang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda.....	73
--	----

5.2. Peraturan tentang Locale Raden pada kotapraja tanggal 1 Juli 1925....	75
5.3. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang Locale Raden tanggal 25 Desember 1925 No. 10.....	77
5.4. Surat Keputusan Ratu Juliana tentang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1925 No. 62	78
5.5. Surat Keputusan Ratu Wilhelmina, tentang Desentralisasi, tanggal 26 Juli 1918.....	79
5.6. Surat dari R.M.H. Woerjaningrat (w.g. voorzitter) dan R. Soetopo Hadisepoetro (w.g.2e) sekretaris pimpinan Perserikatan Budi Utomo di Yogya kepada Gubernur Jenderal tanggal 9 Nopember 1923.....	80
5.7. Saran dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal, tanggal 26 Nopember 1920 No.1514/K.....	83
5.8. Surat dari Walikota Kotapraja Medan kepada Gubernur Jenderal tanggal 16 Maret 1925 No. 414.....	84
5.9. Saran dari Dewan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal tanggal 25 Maret 1924 No. 6534 menanggapi saran Komisi Desentralisasi.....	85

5.10.Surat dari Komisi Penasehat Desentralisasi kepada Gubernur Jenderal tanggal 27 Pebruari 1924 No. 257/2/K/DI.....	87
5.11.Nota dari Algemeene Secretarie 1921 tentang ketentuan bagi yang telah diper-samakan warga negaranya untuk duduk sebagai anggota Dewan Kotapraja.....	89
5.12.Surat dari Penasehat Kepala Dinas Urusan Warga Negara Cina kepada Gubernur Jenderal tanggal 8 Maret 1921 No. 130/21.....	90
5.13.Surat dari Komisi Penasehat Desentralisasi kepada Penasehat Kepala Dinas Urusan Warga Negara Cina tanggal 17 Agustus 1922 No. 1183/ DI.....	91
5.14.Surat dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 12 Maret 1920 No. 310/K.....	93
5.15.Saran dari Penasehat Desentralisasi kepada Gubernur Jenderal tanggal 4 Pebruari 1925 No. 189/K/DI.....	95
5.16.Surat pengantar dari Ajun Penasehat Desentralisasi mengenai surat Walikota Kotapraja Medan tanggal 8 Mei 1925 No. 6147/D.....	98

5.17.Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 9 Mei 1924.....	99
5.18.Surat Keputusan Ratu Wilhelmina tentang Desentralisasi tahun 1923 diperbaiki kembali tanggal 4 Oktober 1924 No. 12.....	100
5.19.Mosi dari perkumpulan Budi Utomo di Solo ditujukan kepada Gubernur Jenderal, dalam rapat terbuka tanggal 13 Oktober 1923.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

SAMBUTAN

Akhir-akhir ini persoalan otonomi daerah ramai diperdebatkan oleh banyak kalangan, baik politisi, akademisi maupun praktisi. Penerapan otonomi daerah itu diwarnai oleh berbagai pandangan, baik yang pro maupun yang kontra.

Adalah suatu realitas bahwa setiap negara selalu dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan penerapan sistem dan mekanisme pemerintahan. Sentralisasi maupun desentralisasi, adalah masalah klasik yang tak pernah selesai diperdebatkan, karena keduanya mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing.

Persoalan otonomi daerah di Indonesia selalu menjadi aktual dibicarakan karena topik ini nyaris tak pernah diselesaikan. Padahal kalau kita menengok kembali latar belakang sejarah Bangsa Indonesia, sebenarnya pada masa Kolonial, masalah otonomi pernah diuji coba penerapannya dengan cara memberlakukan otonomi di beberapa daerah.

Sumber-sumber mengenai penerapan otonomi daerah dalam bentuk arsip, sampai saat ini masih tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas, karena beberapa sebab diantaranya kesulitan memahami bahasa yang ada pada sumber itu.

Menghadapi kenyataan ini ANRI mencoba menerbitkan

naskah sumber yang berhubungan dengan otonomi daerah pada masa Kolonial itu, edisi khusus ini berusaha menerbitkan jalan masuk untuk memahami masalah otonomi daerah dengan judul **Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903 - 1940"**.

Melalui penerbitan naskah sumber ini diharapkan dapat mengantar para pengguna untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang otonomi daerah dalam rangka ikut memecahkan persoalan bangsa masa kini dan yang akan datang.

Jakarta, 27Januari1999

Kepala Arsip Nasional RI

Dr. Mukhlis Paeni

PENGANTAR

Dalam sejarah administrasi negara Republik Indonesia, asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi (otonomi daerah) merupakan tema yang tidak pernah lepas dari permasalahan administrasi negara sejak Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa dengan nama Hindia Belanda, hingga masa kini. Disadari sepenuhnya bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda telah mewariskan tidak sedikit pola-pola pemerintahan kepada Pemerintah Republik Indonesia sekarang ini, termasuk masalah desentralisasi dengan otonomi daerahnya.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang sedang menjadi isu masyarakat dimasa sekarang yaitu tentang pemberlakuan otonomi daerah, maka pada kesempatan ini Arsip Nasional RI ingin berperan serta menyumbangkan informasi yang terkandung dalam khasanah arsip, mengenai sejarah perkembangan otonomi daerah yang telah diuji coba jauh sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1903 saat Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial.

Alasan tema otonomi daerah diangkat dalam penulisan ini tidak lain bahwa dengan beralihnya negara Indonesia dari status negara jajahan menjadi negara yang berdaulat, maka beralih pula bentuk dan susunan negara, bentuk dan susunan daerah, dualisme pemerintah di daerah, perlu tidaknya dinas-dinas di daerah, dan sebagainya. Semua itu mempengaruhi hukum negara dan hukum administrasi negara yang berlaku terhadap pelaksanaan desentralisasi dengan otonominya itu antara masa Kolonial dengan masa Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Secara resmi desentralisasi diperkenalkan dalam pemerintahan sejak 1903 melalui Undang Undang Desentralisasi. Tujuannya adalah dimungkinkan adanya pembentukan daerah-daerah otonom diseluruh wilayah Hindia Belanda. Hal ini dipandang perlu karena sistem sentralisasi yang selama ini dipergunakan ternyata tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat lokal. Berdasarkan sistem sentralisasi, pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pusat. Tapi berhubung dengan makin banyaknya urusan yang harus dilayani, sementara karena sistem yang dianut adalah sentralisasi, maka masalah-masalah yang bersifat lokal dan yang sederhana pun harus diurus oleh pemerintah pusat. Keadaan seperti ini membuat pemerintah pusat tidak mampu lagi memikul beban tugas yang semakin berat. Karena itu perlu lebih baik untuk memulai menyerahkan urusan dan kepentingan lokal kepada pemerintah daerah setempat. Ketentuan ini lalu diundangkan dalam **De Indische Comptabiliteit Wet** (1864).

Karena berbagai hal, realisasi pelaksanaan desentralisasi baru terlaksana pada 1903 saat diberlakukannya Undang Undang Desentralisasi. Pada prinsipnya undang-undang ini bertujuan membuka kemungkinan pembentukan daerah otonom dengan nama **Locale Ressorten** (diundangkan dalam **Staatsblad** 1905 No. 181). Untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat lokal, dibentuklah **Locale Raden** (dewan-dewan lokal) yang dapat menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas di bidang lokal. Dewan-dewan lokal yang ada diberbagai wilayah itu adalah:

- **Gewestelijk Raden** (untuk daerah gewest)
- **Plaatselijke Raden** (untuk bagian daerah gewest)
- **Gemeente Raden** (untuk daerah kotapraja)

Pada perkembangan selanjutnya desentralisasi dengan bentuk **Locale Ressen** tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lokal yang semakin beragam sehingga perlu dilakukan reorganisasi pemerintahan. Reorganisasi pemerintahan dapat diwujudkan pada 1922 dengan dikeluarkannya **Bestuur Hervorming Wet (Staatsblad 1922 No. 216)**. Inti dari undang-undang ini yaitu melakukan pengaturan dan pembaharuan kembali sistem pemerintahan yang ada. Untuk memudahkan pelaksanaan otonomi berdasar undang-undang tahun 1922 ini, maka dalam melaksanakan pemerintahan dilakukan beberapa pembagian, yaitu :

- 1) Pembagian Administratif
- 2) Pembagian Kenegaraan
- 3) Pembagian Organik

I. PEMBAGIAN ADMINISTRATIF

Dalam pelaksanaan pemerintahan, daerah yang luas ini dibagi-bagi dalam beberapa tingkatan hierarkhis, yang dibedakan antara Jawa/Madura dengan di luar Jawa/Madura, hierarki yang paling tinggi adalah propinsi-propinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Tiap-tiap propinsi dibagi lagi dalam wilayah-wilayah karesidenan yang masing-masing dipimpin oleh seorang residen. Tiap-tiap karesidenan dibagi lagi menjadi afdeeling-afdeeling

yang masing-masing dikepalai oleh asisten residen. Di wilayah afdeeling, diangkat pula seorang bupati yang mengepalai wilayah kabupaten. Jadi dalam satu wilayah terdapat 2 pejabat penguasa yaitu asisten residen dan bupati. Karena dalam hierarki pemerintahan jabatan keduanya adalah setara, maka dalam melaksanakan tugas diharuskan bekerja-sama. Pada prakteknya asisten residen lebih menjadi **adviseur** (penasihat) dari bupati dan bupati melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kabupaten yang dipimpinnya. Asisten residen tidak memerintah langsung wilayah itu karena telah dilaksanakan oleh bupati. Tiap-tiap kabupaten dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (distrik) di bawah pimpinan wedana. Tiap-tiap kawedanan dibagi lagi dalam kecamatan (**onder district**) di bawah asisten wedana. Tingkat yang paling akhir adalah desa merupakan bagian dari **onder district** dipimpin seorang kepala desa.

Sementara itu pembagian wilayah berdasar hierarki untuk luar Jawa/Madura, hampir sama, tingkat yang paling tinggi yaitu propinsi di bawah pimpinan gubernur; karesidenan di bawah residen; afdeeling di bawah asisten residen; **onderafdeeling** di bawah kontrolir; district di bawah wedana (demang); **onder district** di bawah asisten wedana; dan tingkat yang paling bawah setara dengan desa yaitu Marga, Kuria, Nagari atau nama lain di bawah kepala desa. Jabatan gubernur, residen, asisten residen, kontrolir harus dijabat oleh orang Belanda, sedang jabatan lainnya dipegang oleh pribumi.

Para petinggi ini dalam sistem otonomi mempunyai kewenangan :

- Secara mandiri mengurus kepentingan ekonomi wilayahnya
- Mengatur rumah tangganya sendiri
- Mempunyai wewenang membuat **regels local** (peraturan-peraturan lokal)
- Memberi ancaman hukuman bagi yang melanggar regels tersebut.
- Pengawasan terhadap keadaan politik
- Melaksanakan berbagai tindakan di bidang ekonomi
- Menyelesaikan masalah agraria,
- Pelaksanaan di bidang sosial (kesehatan, pengajaran, dan lain-lain).

II. PEMBAGIAN KENEGARAAN

Dalam pengertian ketatanegaraan wilayah Hindia Belanda terbagi dalam kategori :

- 1) Daerah-daerah di mana kedaulatan (**souvereniteit**) Belanda diakui secara tegas. Daerah-daerah tersebut mutlak berada di bawah kekuasaan Belanda. Daerah-daerah ini meliputi:
 - a) Daerah-daerah di bawah pemerintahan langsung atau yang disebut daerah gubernement (**direct bestuur gebied**);
 - b) Daerah-daerah yang berada di luar pemerintah langsung yang disebut daerah-daerah swapraja, di mana para raja sedikit banyak mempunyai hak berpemerintahan sendiri (**in-direct bestuur gebied** atau **inlandsche zelfbestuur**). Daerah dari berbagai negara serta

negara-negara kecil yang satu sama lain tidak saling mengenal ini telah mengakui "souvereniteit" Belanda secara langsung atau tidak.

- 2) Wilayah yang berada dalam pengaruh lingkungan kekuasaan Belanda atau sebuah negara pribumi yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Maksudnya baik langsung atau tidak daerah ini telah masuk dalam pengaruh lingkungan Belanda (**Nederlands invloedsfeer**).
- 3) Wilayah yang tidak termasuk dalam nomor 1 atau 2, tetapi berada dalam pengaruh lingkungan Belanda.

III. PEMBAGIAN ORGANIK

Dalam tata hukum Hindia Belanda, terdapat daerah-daerah yang bebas berdiri sendiri, oleh karena diberi wewenang otonomi, maka dijadikan kesatuan masyarakat hukum yang berdiri sendiri. Hal ini dapat terjadi karena didukung oleh berbagai peraturan perundangan tentang desentralisasi. Produk-produk hukum tentang desentralisasi tersebut:

- Undang-undang tentang desentralisasi tahun 1903.
- Surat Keputusan tentang desentralisasi tahun 1904 (**Decentralisatie Besluit**).
- Ordonansi dewan-dewan lokal tahun 1905 (**Locale Raden Ordonnantie**).
- Undang-undang tentang perubahan pemerintahan tahun 1922 (**Bestuur Hervormings Wet**).

Berdasar pada produk hukum tersebut, maka

muncullah daerah-daerah yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah-daerah semacam itu yakni :

- 1) Daerah Swapraja
- 2) Wilayah Dewan Lokal
- 3) Haminte Pribumi
- 4) Propinsi
- 5) Kabupaten Otonom
- 6) **Gemeente Raad** (Dewan Kotapraja)

ad. 1) Daerah Swapraja

Telah menjadi kenyataan bahwa tidak semua wilayah yang ada di Nusantara ini berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Daerah yang masih bebas mengatur rumah tangganya sendiri tersebut yaitu daerah-daerah swapraja dan desa yang jumlahnya cukup banyak baik di Jawa maupun di luar Jawa. Daerah-daerah itu berpemerintahan sendiri sesuai dengan hukum asli Indonesia yang berdasar hukum adat di masing-masing daerah. Jadi dengan demikian berarti bahwa jauh sebelum diberlakukannya desentralisasi dengan otonomi daerahnya itu, di Nusantara ini telah lama melaksanakan pemerintahan secara otonomi berdasar hukum asli Indonesia. Daerah-daerah swapraja ini disebut **inlandsche zelfbestuur gebied** yaitu daerah-daerah yang menyelenggarakan pemerintah sendiri serta mengatur rumah tangganya sendiri, karena pemerintah Hindia Belanda belum dapat memerintah secara langsung atas wilayah ini.

Dalam kondisi seperti ini, sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah-daerah swapraja tersebut

hanya memberi pengakuan bukan pengaturan. Dengan pengakuan ini pemerintah Hindia Belanda berharap dapat mengadakan pengawasan dan pembatasan. Jadi singkatnya secara de facto daerah-daerah ini diperintah sendiri oleh raja pribumi dengan berbagai macam gelar, tetapi secara de jure mereka di bawah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda. Sebagai konsekuensinya, para raja pribumi mengakui :

- a) Kedaulatan Pemerintah Kerajaan Belanda di daerah mereka sendiri dan bersumpah setia kepada Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal.
- b) Mematuhi semua aturan dan perintah gubernemen.
- c) Tak akan mengadakan perjanjian politik dengan negara-negara asing.

Sebagian besar daerah-daerah ini asalnya merupakan negara-negara kecil yang merdeka, lalu berangsur-angsur dikuasai oleh kekuasaan tertinggi Kerajaan Belanda. Kadang-kadang juga daerah ini dibentuk atas prakarsa Pemerintah Belanda sehingga timbul ketergantungan kepada Pemerintah Belanda. Untuk membatasi kekuasaan raja-raja itu diadakanlah perjanjian politik, yaitu :

- a) Kontrak Panjang (**lange verklaring**/perjanjian panjang). Kepala daerah swaparaja yang ternama, biasanya mengadakan kontrak panjang di mana hak-hak dan kewajiban-kewajibannya disebutkan satu per satu. Kontrak panjang ini terdapat pada 17 buah daerah swapraja seperti Yogyakarta, Surakarta, Deli, Serdang, Langkat, Asahan, Siak, Kendari, Bima, Sumbawa, Gowa, Bone, Bali, Lombok, dan lain-lain. Pernyataan-pernyataan singkat ini telah ditandatangani oleh 277 penguasa daerah swapraja.

- b) Kontrak Pendek (**korte verklaring**/perjanjian pendek). Dalam perjanjian ini hanya ada satu pernyataan dari pemerintah daerah swapraja bahwa ia mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di atas kekuasaan pemerintah daerah swaprajanya. Ia tidak akan mengadakan hubungan dengan negara lain dan berjanji mentaati semua peraturan perundangan yang akan dan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Ad.2. Ressorst Locale Raden (wilayah dewan lokal)

Daerah-daerah yang termasuk dalam **ressort locale raden** yaitu daerah-daerah yang berada di bawah pemerintah langsung dan masuk dalam kesatuan masyarakat hukum. Daerah ini sudah diberi wewenang mengelola sendiri uang negara secara khusus untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan daerahnya. Supaya dana tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya maka dibentuklah **raden** (dewan-dewan) yang mengelola keuangan tersebut. Dengan adanya kewenangan mengelola sendiri yang dilakukan oleh dewan, maka daerah itu dinamakan **ressort** dari dewan lokal. Semua dewan lokal baik tingkat propinsi maupun kabupaten dan kotapraja diberi wewenang pula menetapkan **verordening-verordening** mengenai kepentingan daerahnya masing-masing.

Ad.3. Haminte pribumi

Bentuk tertua dari desentralisasi pribumi yaitu haminte pribumi atau desa. Pengertian desa di sini yaitu suatu tempat yang dihuni beberapa wajib pajak. Desa ini tumbuh sebagai badan hukum berpemerintahan sendiri dan mempunyai tanah sendiri yang diperuntukkan bagi warga yang menetap di situ.

Kepala Desa adalah penguasa tunggal di desa itu. Ia bertanggungjawab terhadap ditaatinya perintah-perintah dari pamong praja pribumi. Karena bukan pegawai negeri, ia tidak menerima gaji. Untuk gantinya mendapat tanah apanage serta presentase dari hasil pemungutan pajak. Dalam hal yang penting, seperti penetapan anggaran tahunan, dimintakan saran dan pendapat dari rapat desa yang anggotanya terdiri dari orang-orang terpandang.

Dengan adanya ordonansi haminte dari pemerintah, maka Pemerintahan Desa ini mendapat hak otonomi termasuk kewenangan menetapkan verordening pajak dan pidana, mengatur administrasi desa, polisi desa, penerangan, pemeliharaan jalan-jalan desa, irigasi, sekolah-sekolah, dan lain-lain. Pengawasan terhadap desa ini dilakukan oleh :

- **College van Gedeputeerden** (dewan pemerintah harian propinsi)
- **College van Gecommitteerden** (dewan pemerintah harian kabupaten).

Pengaturan dan pengawasan ini didasarkan atas **inlandsche gemeente ordonnantie** Jawa/Madura dan **buitengewesten** Jawa/ Madura **Staatsblad** 1906 No. 83, (**Staatsblad** 1918 No. 677, Bangka **Staatsblad** 1919 No. 453, dan sebagainya).

Ad.4. Propinsi

Dengan adanya **Bestuur Hervormings Wet** 1922, otonomi yang diberikan kepada propinsi makin luas. Pada hakekatnya roda pemerintahan propinsi ini dilaksanakan oleh :

- a) **Provinciale Raad** (dewan propinsi)
- b) **College van Gedeputeerden** (badan pemerintah harian yang bersifat fakultatif)
- c) Gubernur

Keterangan:

a. Dewan Propinsi

Adalah badan yang terdiri dari orang Belanda, Pribumi dan Timur Asing. Beberapa anggota diangkat berdasar pemilihan oleh dewan setempat, sedangkan anggota lainnya diangkat oleh Gubernur Jenderal. Masa jabatan berlangsung 4 tahun. Mereka yang terpilih jadi anggota adalah yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Karena propinsi mempunyai sumber pendapatan sendiri, maka dewan punya wewenang menetapkan anggaran dan **verordening-verordening**, menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar **verordening**. Dewan juga mengurus rumah tangga yang meliputi jalan, jembatan, bangunan, pengairan, dinas-dinas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kesehatan rakyat, eksploitasi perusahaan-perusahaan negara, dan lain-lain.

b. **College van gedeputeerden**

Badan sehari-hari di propinsi. Badan ini juga berhak mengangkat dan memberhentikan semua pegawai propinsi, mengawasi keuangan pada tingkat keresidenan dan kabupaten, kota praja, juga memberi ijin-ijin tertentu, berhak mengeluarkan uang dalam batas yang telah ditetapkan oleh anggaran.

c. Gubernur

Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Ia sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah umum pusat di daerah, dan bertanggung-jawab terhadap pendapatan propinsi: pajak-pajak, retribusi, keuntungan perusahaan-perusahaan, saham cukai bensin, subsidi dari keuntungan proyek-proyek besar.

Ad.5. Kabupaten Otonom

Dalam menjalankan roda pemerintahan, mengatur dan menjalankan rumah tangga dilakukan oleh :

- Dewan kabupaten
- **College van Gecommitteerden**
- Bupati

Dewan Kabupaten

Dewan kabupaten adalah badan perwakilan, yang terdiri dari golongan masyarakat, pedagang pribumi, intelektual dan tetua masyarakat. Sebagian anggota dipilih dan bagian lainnya diangkat oleh Gubernur. Lama masa jabatan 4 tahun, dan telah memenuhi persyaratan tertentu.

Wewenang dan tugas dewan kabupaten yaitu mengurus dan mengatur rumah tangga kabupaten yang mempunyai keuangan sendiri, menetapkan anggaran kabupaten dan membuat **verordening**, melaksanakan **verordening** umum atau propinsi, dan mengatur susunan Pemerintahan Desa.

College van Gecommitteerden

Badan ini melaksanakan pemerintahan sehari-hari, mengangkat pegawai kabupaten, menyiapkan segala sesuatu dengan mendapat persetujuan dewan kabupaten. Badan ini bertanggung jawab kepada dewan kabupaten.

Bupati

Bupati diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, ia merangkap ketua dewan kabupaten dan anggota **college van gecommiteerden**. Ia bertugas melaksanakan **verordeningen** kabupaten maupun tingkat pusat. Ia wajib mematuhi perintah-perintah umum, perintah pejabat propinsi dan keresidenan serta asisten residen.

Pendapatan

- Sumbangan dari kas negeri
- Hasil-hasil pajak
- Pendapatan milik kabupaten
- Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara
- Tambahan pajak verponding, pendapatan negara dan perorangan

Ad.6. Gemeente (kotapraja)

Pada hakekatnya kotapraja dan kabupaten adalah kesatuan masyarakat hukum yang tingkatannya sama, pendapatan daerah serta hak dan kewajibannya sama. Hanya saja kepala kotapraja (**burger meester**) harus dijabat oleh warga Belanda bukan pribumi.

BAB I

PARA RAJA YANG TIDAK MERDEKA LAGI (INLANDSCHE ZELFBESTUUR)

1.1. *Surat dari Sekretaris Gubernur Jenderal kepada Dewan Penasehat Hindia Belanda tanggal 17 Juni 1935 No.135/A (Rahasia)*

By het, den Raad van Nederlandsch-Indie bekend, dezerzijdsch geheim schrijven van 13 December 1934 no, 281/A is den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden verzocht in overleg met zijn ambtgenoot van Bali en Lombok de Regeering te adviseeren over het herstel als zelfbesturen van Goa en van de voormalige landschappen op Bali.

In voldoening aan deze opdracht deden genoemde Hoofden van gewestelijk bestuur van hun gevoelen blijken bij hun in originali hierbij overgelegene geheime brieven respectievelijk van 11 en 25 Februari jl. nos Bx 3/1/2 en 238, terwijl de Directeur van Binnenlandsch Bestuur van advies diende bij zijn met de nader te noemen bescheiden mede hiernevensgaan geheim schrijven van 3 Mei jl. no. Bg x/3/7.

Wat betreft het herstel van de voormal zelfbesturen op Bali gemeend werd dat herstel van Goa bij hoofden en bevolking van Bali gelijksoortige verwachtingen zou doen ontstaan.

Sumber : Bt. 12 Nopember 1936 No.8; Bt. 28 Mei 1937 No.18

Abstraksi :

1.1. Surat dari Sekretaris Gubernur Jenderal kepada Dewan Penasehat Hindia Belanda tanggal 17 Juni 1935 No. 1135/A (rahasia)

Dewan Hindia Belanda berdasarkan surat tanggal 13 Desember 1934 No. 281/A, bahwa Gubernur Celebes dan daerah sekitarnya telah mengajukan permohonan dalam rapat dengan raja-raja dari Bali dan Lombok untuk membahas perbaikan Gowa sebagai pemerintahan sendiri.

1.2. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1936 No. 8.

Is goedgevonden en verstaan :

Eerstelijk : Te bepalen, dat tot het zelfbesturend landschap Gowa worden gerekend de in het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden gelegen Gowa'sche gebiedsdeelen Karoewisi, Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borisallo, Manoedjoe, Borongloe, Parigi, Limboeng, Bontonompo, Malakadji en Pao.

Ten tweede: Den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden te machtigen om Mangi-Mangi KaraEng Bontonompo de Korte Verklaring te doen afleggen en te beeedigen als optredend bestuurder van het in artikel 1 van dit besluit omschreven landschap Gowa (onderafdeeling Gowa, afdeeling Makasar, gouvernement Celebes en Onderhoorigheden).

Ten derde : Met ingang van het tijdstip van goedkeuring

en bekrachtiging van de in artikel 2 bedoelde Korte Verklaring, buiten werking te stellen het besluit van 3 November 1910 No. 38 (Staatsblad No. 573), voorzover dit nog van kracht is en de verdere werking daarvan met het in die besluit geregeld herstel van Gowa als zelfbesturend landschap strijdig zou zijn.

Ten vierde : De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden uit te noodigen de optredende landsgrooten van Gowa, den Tomailalang Toa en den Tomailalang Lolo, de in artikel 2 van dit besluit bedoelde verklaring te doen mede ondertekenen.

Ten vijfde : Den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden uit te noodigen ten aanzien van den in het nieuwe zelfbesturende landschap in te stellen adviseerenden raad te handelen als aangegeven in het geheim schrijven van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 22 September 1936 No. Bgx 8/7/5.

Ten zesde : Den Directeur van Financien te machtigen tot het voorbereiden van de wettelijke maatregelen, welke noodig zijn om te geraken tot de overdracht van het vorderingsrecht van het Land op het landschap Gowa ten aanzien der achterstallige belastingen, bedoeld in zijn geheim schrijven van 30 October 1936 No. G.T.b.x. 12-2-16.

Sumber : Bt. 12 Nopember 1936 No. 8; GB.Bt. 28 Mei 1937 No. 18

Abstraksi :

1.2 Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1936 No. 8.

Pada tanggal 12 Nopember 1936, Gubernur Jenderal

Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusannya No. 8, yang isinya :

Pertama, menentukan Gowa sebagai daerah pemerintahan sendiri di dalam pemerintahan Celebes dan sekitarnya yaitu Karoewisi, Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borisallo, Manoedjoe, Borongloe, Parigi, Linboeng, Bontonompo, Malakadji dan Pao.

Kedua, Gubernur Celebes dan daerah sekitarnya berkuasa atas Mangi-Mangi KaraEng Bontonompo dan disumpah sebagai penguasa di daerah Gowa, Makasar.

Ketiga, sesuai dengan pasal 2 dalam perjanjian pendek, surat keputusan tanggal 3 Nopember 1910 No. 38 masih mempunyai kekuasaan dalam rangka perbaikan Gowa sebagai pemerintahan sendiri.

Keempat, Gubernur Celebes dan daerah sekitarnya diundang ke Gowa, Tomailalang Toa dan Tomailalang Lolo, seperti tercantum dalam pasal 2 perjanjian yang telah ditandatangani.

Kelima, Gubernur Celebes dan daerah sekitarnya diundang pada pembentukan daerah yang baru dibentuk sebagaimana yang tercantum dalam surat rahasia Direktur Dalam Negeri tanggal 22 September 1936 No. Bgx. 8/7/5.

Keenam, Direktur keuangan berkuasa atas persiapan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam surat rahasia

Direktur Keuangan tanggal 30 Oktober 1936 No. G.T. b.x. 12-2-16.

1.3. Kontrak perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Raja Gowa Mangi Mangi KaraEng Bontonompo dengan pemerintah kolonial tanggal 31 Desember 1936.

VERKLARING

Ik ondergeteekende Mangi Mangi KaraEng Bontonompo optredend bestuurder van het landschap Gowa verklaar :

Ten eerste : dat het landschap Gowa een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch-Indie en derhalve staat onder de heerschappij van Nederland: dat ik mitsdien steeds getrouw zal zijn aan Hare Majesteit de Koningen der Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal als Hoogsterzelver Vertegenwoordiger, uit wiens handen ik het bestuur over het landschap Gowa aanvaard.

Ten tweede: dat ik mij in geenerlei staatkundige aanrakingen zal stellen met vreemde mogendheden, zullende de vijanden van Nederland ook mijne vijanden, de vrienden van Nederland ook mijne vrienden zijn.

Ten derde : dat ik zal nakomen en handhaven alle regelingen, die met betrekking tot het landschap Gowa door of namens de Koningen der Nederlanden dan wel den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie of Diens vertegenwoordiger zijn of zullen worden vastgesteld of toepasselijk verklaard en dat ik in het algemeen alle bevelen zal opvolgen, die mij door of namens den Gouverneur-Generaal of Diens vertegenwoordigers zijn of zullen worden gegeven.

Aldus gedaan en beeedigd te Soenggoemina den dertigsten November negentienhonderd zes en dertig of den

zestienden der maand Ramadhan van het Mohammedaansche jaar dertienhonderd vijftien en opgemaakt in zes fout.

Hier stonden de stempel en de handtekening van den bestuurder van het Landschap Gowa, Mangi-Mangi KaraEng Bontonompo.

Deze verklaring is goedgekeurd en bekrachtigd op den eenendertigsten December negentienhonderd zes en dertig zijnde daarmede tevens Mangi-Mangi KaraEng Bontonompo erkend en bevestigd als optredend bestuurder van het landschap Gowa.

Sumber : Bt. 31 Desember 1936 No.1; GB. Bt. 28 Mei 1937 No.18

Abstraksi :

1.3. Perjanjian antara Raja Gowa Mangi-mangi Karaeng Bontonompo dengan pemerintah Kolonial tanggal 31 Desember 1936.

Mangi-Mangi KaraEng Bontonompo membuat suatu pernyataan yang berisi:

Pertama, daerah Gowa menjadi bagian pemerintah Hindia Belanda dan sebagai hambanya harus setia pada raja Belanda dan Gubernur Jenderal sebagai wakil tertinggi.

Kedua, menganggap semua musuh Belanda adalah musuhnya juga dan teman Belanda adalah temannya.

Ketiga, akan memperhatikan dan mempertahankan semua peraturan yang berkaitan dengan Gowa atas nama raja Belanda dan juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Pernyataan ini dibuat di Soenggoeminasa pada tanggal 30 Nopember 1936 atau 16 Ramadhan 1355, dalam rangkap enam.

1.4. *Saran dari Departemen Keuangan ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 30 Oktober 1936 No. GT.BX. 12-2-16*

1. Blijkens bovenstaand schrijven kan de Directeur van Binnenlandsch-Bestuur zich vereenigen met voorstel van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden o.m. gedaan in diens brief van 11 Augustus j.l. No.1103/Geheim, om de achterstallige belastingschulden betreffende door het Gouvernement voor 1 Januari 1937 aan personen, die vanaf dat tijdstip tot de groep der zelfbestuursonderhoorigen zullen behooren, opgelegde belastingen, ten bate der Landschapskas van Goa te doen innen. Nader telegrafisch door den heer Swaab verstrekte gegevens (afschrift der betrekkelijke telegrammen hierbij eerbiedig aangeboden) doen zien dat deze belastingterstand op 1 Januari a.s. hoogstens f. 40.000 zal bedragen.
2. De prijsgeving door het Land van dit bedrag ziet de Gouverneur als een alleszins billijke tegemoetkoming in de behoefte van het nieuwe Zelfbestuur aan directe middelen ter bekostiging van de dadelijk noodzakelijke uitgaven, welke, blijkens evengenoemde telegrammen, vermoedelijk 50.000 zullen bedragen.

Sumber : Bt. 12 Nopember 1936 No. 8; GB. Bt. 28 Mei 1937 No.18

Abstraksi :

1.4 *Saran dari Departemen Keuangan ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 30 Oktober 1936 No. GT. BX. 12-2-16.*

Pajak yang harus ditanggung oleh Gowa sebagai daerah baru adalah f.40.000,- sejak 1 Januari 1937. Menurut Swaab, jumlah ini bisa menjadi f.50.000,-

1.5. *Permohonan ulang dari Kerajaan Goa sebagai wilayah yang berpemerintah sendiri, 1936*

Gouverneur Swaab, die intusschen kennis had genomen van het advies van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur over zijn voorstellens einde 8 dezer het verzoek om op den brief van den heer van Lith terug te mogen komen.

Ziet men goed dan kan de beweegreden van dit verzoek slechts gelegen zijn in het voorstel van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur om het herstel van Goa 1 Januari 1937 te bewerkstelligen. In andere opzichten gaat dit Departements hoofd immers geheel met de voorstellen van den heer Swaab accord.

Naar het der afdeeling bescheidenlyk voorkomt is aan den datum van 1 Januari 1937 niet te ontkomen. Afgezien van de vraag of herstel van Goa voor 1 Januari 1937 technisch mogelijk zou zijn, moet er nog zooveel worden voorbereid en geregeld dat naar het voorkomt het herstel op 1 Januari 1937 niet eens veel tijd zal overlaten.

De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden stelt voor om Soenggoeminasa te maken tot hoofdplaats van dit herstellende zelfbestuur, tot verblijfplaats van den Zelfbestuurder.

Nu is Soenggoeminasa een goednieuwe vestiging, een plaats zonder traditie, aangelegd in een tijd toen men er op uit was alles wat aan het bestaan van het oude Goa herinnerde, te vernietigen.

Soenggoeminasa is een stuk sawah met er op het huis van den Controleur, diens kantoor, een passer, een gevangenis en school.

De aloude hoofdstad van Goa, de kenen van dit eertijds zoo machtige rijk, is Djongaja en ook na de inlijving van Goa heeft Djongaja zijn beteekenis behouden.

Wel heeft men na de verovering van Goa het paleis van den vorst met den grondgelijk gemaakt, heeft men op de plaats waar het gebouw stond wegwalsen laten ryden, heeft men dwars over die plaats de groote verkeersweg aangelegd, dit alles heeft niet mogen baten, de adel van Goa te Djongaja blijven wonen en oefent van deze plaats zijn invloed op den gang van zaken uit.

Sumbër : Bgs. 12 Maret 1936 No. 559/A; GB. Bt. 28 Mei 1939 No. 18

Abstraksi :

1.5. Permohonan ulang dari Kerajaan Gowa sebagai wilayah yang berpemerintahan sendiri, 1936

Perubahan Gowa sebagai daerah yang mengatur pemerintahannya sendiri mulai tanggal 1 Januari 1937.

Soenggoeminasa adalah daerah yang diunggulkan mengatur pemerintahannya sendiri dan di bawah kekuasaan KaraEng di Djongaja. Soenggoeminasa menjadi daerah yang tidak lagi memegang tradisi karena sudah menjadi daerah

baru. Soenggoeminasa adalah sepetak sawah dengan rumah pengawas, kantor, sebuah pasar, sebuah rumah penjara dan sekolah.

Ibukota Gowa yang menjadi pusat kerajaan adalah Djongaja, tetapi Soenggoeminasa diusulkan menjadi Ibukota Gowa atas usul dari Gubernur Celebes dengan alasan bahwa Djongaja terletak di luar pusat. Jarak antara Djongaja dengan Soenggoeminasa hanyalah 7 km.

1.6. Konsep Perbaikan Peraturan Otonomi untuk daerah Bali oleh Algemeene Secretarie, 1937

De vraag van het herstel van de zelfbesturende landschappen op Bali, die aan de orde is, is een uitvloeisel van het thans onbestreden inzicht, dat de inheemsche staatsrechtelijke vormen kostbare elementen zijn voor de deconcentratie van het regeeren over het onmetelijk Indisch gebied.

Het is bekend, dat de verschillende hervormingen en hervormingsplannen ten aanzien van genoemd eiland niet altijd uit dien gezichtshoek zijn bekeken.

Nadat in 1895 tegen Lombok was geoorloofd en dit rijk ingelijfd, wilde men zijn vazalrijk Karangasem (op Bali) niet hetzelfde lot doen deelen. Het werd omgezet in een zg. gouvernementslandschap d.w.z. een vroger vorstenrijk, dat noch landschap blijft noch rechtstreeks bestuurd gebied wordt doch in een tusschen toestand komt te verkeeren, hierdoor gekenmerkt dat het (a) afhankelijk wordt van den eenzijdigen wil der Indische Regeering - de onaantastbaarheid van zijn bestaan verliest, doch (b) feitelijk gelaten wordt in zijn inheemsch bestel, alsof het nog zelfbesturend landschap was. Karangasem beheid

zoodoende zijn eigen kas, zijn eigen verordeningsbevoegdheid, bleef onttrokken aan het complex der gouvernementsvoorschriften. Later werden ook de rijken Gianjar en Bangli met hun eigen wil in zoodanige gouvènementslands chappen omgezet (1900 en 1908). De overige rijken werden wegens verscheidene uiteenloopende redenen tot rechtstreeksch gebied verklaard (Djembrana en Boecleng 1882, Tabanan 1904, Badoeng 1906 en Kloengkoeng 1911).

Sumber : Bgs. 27 Maret 1937 No. 651/A; GB. Bt. 28 Mei 1937 No. 18.

Abstraksi :

1.6 Konsep Perbaikan Peraturan Otonomi untuk daerah Bali oleh Algemeene Secretarie, 1937

Pembentukan kembali Bali untuk menjadi suatu daerah yang menjalankan pemerintahnya sendiri masih menjadi pertanyaan, karena Bali adalah daerah yang berharga. Ketika sesudah tahun 1895 Bali berperang dengan Lombok, Raja Karangasem di Bali tidak mau bergabung, Karangasem menginginkan mempunyai kas sendiri, dan peraturan sendiri.

1.7. Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal, dalam rapatnya tanggal 4 Maret 1937

1. Alvorens in te gaan op de voorliggende over herstel van zelfbesturen op Bali handelende brieven van den Resident van Bali en Lombok en van den Directeur van

Binnenlandsch Bestuur resp. van 20 Juli 1936 No. Bx. 3/1/11 geh. en van 31 October d.o.v. No. Bgx. 8/6/7 geh. Moge de Raad van Nederlandsch-Indie aandacht vragen voor den stand van het vraagstuk van het herstel van zelfbestuur in algemeenen en principiëelen zin.

2. Over deze aangelegenheid werd in Regeerings bescheiden voor het eerst gehandeld in het beginselen plan omtrent de doorvoering van de bestuurshervorming in de Buitengewesten, hetwelk in 1931 doorden Volksraad en in 1932 door de Staten-Generaal werd aangenomen.
3. Het in uitzicht gestelde onderzoek werd destijds niet algemeen ingesteld, doch tot Goa beperkt. De omstandigheden bleken aldaar een herstel van zelfbestuur zeer wenschelijk te maken, terwijl omtrent de moeilijke vraag naar de juridische basis voor dergelijk herstel beslist werd ten gunste van het afleggen eener Korte Verklaring in den gebruikelijken vorm door het nieuwe zelfbestuursorgaan. Hiermede was voor het herstel van zelfbestuuren een voorbeeld en een juridisch intecedent geschapen.
4. Na dit besluit vond einde 1935 overleg plaats met den Minister van Kolonien omtrent de doorvoering van bestuurshervorming in de Buitengewesten, waarvan sinds 1932, om redenen die verband hielden met de crisis, was afgezien. De resultaten van dit overleg zijn neergelegd in den brief van den Minister van Staat, Minister van Kolonien dd.14 November 1935 No. 12/1088. Daarin wijst de Minister op de wenschelijkheid om in het kader van de bestuurshervorming de t.a.v. Goa gevolgde gedragslijn voort te zetten in die gevallen

waarin daarvoor in de Buitengewesten de elementen en voorwaarden aanwezig zijn. De Minister denkt hierbij ook aan herstel van kleinere voormalige zelfbesturen zooals die op Zuid-Celebes, terwijl de Minister na mededeeling onder bepaalde omstandigheden zelfs een zekere voorkeur te gevoelen voor herstel van zelfbestuur boven instelling van westersch-democratische raden, daaraan toevoegt dat, indien voor Bali herstel van zelfbestuur meer geeigend wordt geacht dan in het leven roepen van verdienen en 's Ministers volle instemming zou hebben.

5. De Indische Regering stemde in met de in den Ministerieelen brief vervatte richtlijnen en hiermede werd ook de algemeene gedragslijn door de Indische Regeering aan te nemen t.a.v. het herstel van zelfbesturen vastgesteld.
6. Het kwam den Raad van Nederlandsch-Indie wenschelijk voor zich ervan te vergewissen in hoeverre verwacht kan worden, dat na het herstel van zelfbesturen op Bali aanleiding zal bestaan om tot overeenkomstige maatregelen in gedeelten van den Archipel over te gaan.
7. Naar het gevoelen van het met de algemeene leiding van de bestuurshervorming belast Lid van het College, dat door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur - die op zijn verzoek aan 's Raads beraadslaging over dit onderwerp deel nam - bleek te worden gedeeld, zal een dergelijke maatregel nog slechts wenschelijk kunnen zijn ten aanzien van enkele landschappen in Zuid-Celebes, het gebied van Gorontalo in de Residentie Manado en wellicht Groot Atjeh. Een verder doorvoeren van deze omzetting tot gedeelten van Java, waar nog

aanknoopingspunten aan zelfbesturen zouden kunnen worden aangetoond (Madoera, Cheribon, Banten) ligt niet in het voornemen.

8. Voor wat betreft de meest geeigende bestuursvorm voor Bali, teekent de Raad het volgende aan. Bij. B.G.S. van 16 Augustus 1928 Nr. 1803a/II besloot de Regeering om in aansluiting op het — inheemsche benaming voor de Balische regentschappen — alwaar dit regenten bestuur door den loop der gebeurtenissen in het begin van deze eeuw was verdwenen, in alle negaras raden in te stellen gelijk te Karangasemraad. Deze beslissing die geheel in overeenstemming was met de wenschen toenmaals van de Balische hoofden en eveneens in overeenstemming met de inzichten destijds volgens welke de Karangasemraad in tegenstelling tot de onderafdeelingsraden in Z.O. Borneo en in Sumatra behoorde tot de geslaagde locale raden, werd door Gouverneur-Generaal de Graeff tijdens een bezoek aan Bali plechtig bevestigd, terwijl tot getuigenis van dit denkbeeld waar van de verwezenlijking door de crisis werd opgehouden, jarenglang een memoriepost op de landsbegrooting verscheen.
9. De Resident van Bali verklaart in dit verband dat in Boeileng en Djembrana weder een dynastie groeiende is. Ter vermindering van mogelijk uit het bezigen van dezen term voortspruitend misverstand moge de Raad er op wijzen, dat het niet gewenscht voorkomt om bestuursgeslachten in Bali door een degelijke terminologie hooger aan te slaan dan passend is.

Sumber : Kl.11 Nopember 1937 No. 3774 geheim; BGS. 27 Maret 1937 No. 651/A; GB. Bt 28 Mei 1937 No. 8.

Abstraksi :

1.7 *Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal, dalam rapatnya tanggal 4 Maret 1937*

Dewan Penasehat Hindia Belanda mengusulkan beberapa hal yaitu:

- Masalah perbaikan pemerintahan sendiri di Bali sehubungan dengan surat Residen Bali dan Lombok serta surat dari Direktur Dalam Negeri.
- Mengenai hal tersebut sudah ditangani oleh pemerintah di mana pada tahun 1931 mulai direncanakan di daerah-daerah luar oleh **Volksraad** dan **Staten-Generaal** pada tahun 1932.
- Daerah-daerah luar tersebut adalah Gowa yang akan diperbaiki kembali pemerintahannya, demikian juga Celebes Selatan.
- Perbaikan daerah Bali sebagai pemerintahan sendiri sudah dirundingkan dengan kepulauan lainnya.
- Daerah-daerah yang akan diperbaiki pemerintahannya termasuk adalah Buleleng dan Djembrana, sedangkan daerah-daerah ini tumbuh sebagai suatu "dynasti" .

1.8. *Surat dari Direktur Dalam Negeri kepada Gubernur Jenderal tanggal 3 Mei 1935 No. Bgx 8/3/7 (bijlagen : 2 doordrukken)*

..... bij de zendbrieven van 23 Februari 1935 en 5 Maart 1935 nos 617/ Geheim en 785/Geheim verstrekte opdrachten om te dienen van beschouwingen en raad over de nopens het herstel van het zelfbestuur van Goa handelende geheime brieven van den Resident van Bali en Lombok en den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden,
onderscheidenlijk van 11 Februari 1935 No. Bx 3/1/2 en 25
Februari 1935 No. 238,

In de eerste plaats ... dat naar mijne meening de
motieven, welke geleid hebben tot de in den B.G.S. van 18
December 1933 No. 381/A vervatte belissing, dat het op
zich zelf gewenschte herstel van zelfbestuur in Goa zou zijn
uit te stellen totdat daartoe een gunstiger tijdstip zal
aangebroken, nog onverkort aanwezig zijn.

..... door de Regeering gedeelde - politieke bezwaren
tegen herstel van Goa als zelfbesturend landschap, niet
uitsluiten gericht waren op de uitwerking, welke een
zoodanige maatregel op Bali zou kunnén hebben, doch op
de bewegingen welke in den geheelen archipel in voormalig
zelfbestuursgebied misschien te verwachten zullen zijn (bv.
in Bantam, Cheribon, Madoera, Djambi, Palembang,
Bandjermasin).

1e. Zou zijn te onderzoeken of herstel van Goa als
zelfbesturend landschap de Regeering voor riele
moeilijkheden ten aanzien van wenschen en verlangens van
hoofden en bevolking op Bali zal plaatsen;

2e. Ware na te gaan welke bezwaren en welke
voordeelen aan het herstel van de voormalige zelfbesturen
op Bali zouden zijn verbonden, zoowel als maatregelen op
zich zelf als in verband met het eventueel herstel van Goa.

Wat betreft het eerste punt is de Resident van Bali en
Lombok van oordeel, dat herstel van Goa als zelfbesturend
landschap de Regeering niet voor riele moeilijkheden zal
plaatsen, t. a. v. wenschen en verlangens van hoofden en
bevolking op Bali.

Van bevolkingszijde verwacht genoemd Bestuurshoofd

in het geheel geen moeilijkheden, omdat bevolking zich voor de Goa kwestie niet zou interesseeren.

Van de negara-bestuurders zouden slechts die van Karangasem en Gajjar verlangens in de richting van zelfbestuur hebben; van die zyde worden echter evenmin moeilijkheden verwacht omdat hun gevoelens ten opzichte van het Nederlandsche gezag volkomen loyaal worden geacht.

De autonomie van dat gebiedsdeel blijft behouden en zal zelfs onder den nieuwen vorm van zelfsbestuur, die zich uitstekend aanpast aan het inheemsche karakter van dit gebied, nog beter tot haar recht kunnen komen dan bij de tegenwoordige constructie, die teruggaat op de in 1903 gehuldige opvattingen van decentralisatie.

Sumber : Bt. 12 Nopember 1936 No. 8; GB. Bt. 28 Mei 1937 No.18

Abstraksi :

1.8 Surat dari Direktur Dalam Negeri kepada Gubernur Jenderal tanggal 3 Mei 1935 No. Bgx 8/3/7 (bijlagen : 2 doordrukken)

Surat yang dikirim pada tanggal 23 Pebruari 1935 dan 5 Maret 1935 No. 617 dan 785 semua bersifat rahasia, untuk mengamati usul berpemerintahan sendiri dari wilayah Gowa yang ternyata berbeda dengan pembicaraan dalam surat rahasia dari Residen Bali/Lombok dan Gubernur Celebes dan daerah-daerah kekuasaannya tertanggal 1 Pebruari 1935 No. Bx 3/1/2 dan 25 Pebruari 1935 No.238.

Dalam surat pertama ada beberapa maksud yang

disampaikan, yang mana tertuang dalam surat Bgs 18 Desember 1933 No.381/A, yang pada prinsipnya diusulkan adanya pemerintahan sendiri bagi wilayah Gowa.

Oleh pemerintah, pembagian politik seperti usul pemerintah sendiri bagi wilayah Gowa, pemerintah pusat masih berkeberatan. Tindakan hukum seperti itu bukan tidak diijinkan tetapi memerlukan pengkajian yang teliti. Hal yang sama juga akan diberikan kepada wilayah Bali, tetapi di kepulauan ini diusulkan menjadi wilayah-wilayah berpemerintahan sendiri seperti itu, yang muncul di Banten, Cirebon, Madura, Jambi, Palembang, Banjarmasin.

Sikap pemerintah menanggapi masalah di atas adalah :

1. Pemerintah akan melakukan penyelidikan atas usul wilayah Gowa untuk berpemerintahan sendiri yang secara riil akan dianggap sulit untuk diberikan keinginan dan kehendak dari kepala dan rakyat Bali.
2. Sungguhpun penyelidikan telah dilakukan dan berkeberatan adanya namun manfaat usul berpemerintahan sendiri wilayah Bali kemungkinan ada dalam ikatan seperti peraturan yang berlaku di Bali dan Gowa.

Apakah mengenai butir peraturan tentang Residen Bali-Lombok, bahwa usul Gowa untuk menjadi daerah berpemerintahan sendiri tidak akan mendatangkan kesulitan secara riil, seperti halnya keinginan dan harapan dari kepala-kepala dan rakyat Bali.

Dari sudut rakyat berharap kepala pemerintah yang telah disebut itu secara keseluruhan tidak mendatangkan kesulitan karena rakyat sendiri tak begitu tertarik dengan masalah Gowa seperti tersebut di atas.

Dari penguasa negara yang tertarik hanya Karangasem

dan Gianyar yang ingin berpemerintahan sendiri. Dengan demikian diharapkan mengurangi kesulitan yang disebabkan oleh karena mereka menginginkan sepenuhnya mendapat pengawasan dari pemerintah Belanda, dan kebanyakan dari penguasa negara yang ada menolak atas usul yang diajukan untuk berpemerintahan sendiri.

Dalam pengangkatan Dewan Karangasem dengan lembaga yang ada waktu itu untuk wilayah Karangasem yang akan berpemerintahan sendiri nampaknya tidak berkeberatan.

Sementara itu mengenai otonomi di sebagian wilayah tetap dicoba dan bahkan akan dicoba dalam bentuk baru dari berpemerintahan sendiri, yang akan baik sekali bila digabungkan dengan sifat-sifat asli pemerintahan di wilayah itu

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...
... yang diwujudkan dalam bentuk ...

BAB II

OTONOMI TINGKAT DESA

2.1. Surat dari Direktur Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Jenderal, tanggal 28 Oktober 1919 No. 12487/Btg.

... Aanvankelijk had de Heer Brautigam tegen de invoering van eene Inlandsche Gemeente-ordonnantie bedenkingen, doch sedert heeft de Heer Whitlau, wien het houden van de inleidende besprekingen was opgedragen, een reis door het gewest gemaakt, zichpersoonlijk van de toestanden op de hoogste gesteld en met de betrokken bestuursambtenaren besprekingen gehouden, waarbij ook doel en werking eener Inlandsche Gemeente-ordonnantie werden uitgelegd en voor verschillende gebiedsdeelen de levensvatbaarheid van een dergelijke regeling op grond van bestaande toestanden werd aangestoond. Nadat voorts verschillende bestuursambtenaren in hoofdzaken hun instemming betuig hadden, gaf de Resident toen zijne bedenkingen prijs. ...

Daar de Palembangsche bevolking zeker op hooger trap van ontwikkeling staat dan die van Banka en de gemeenschapszin bij haar stellig grooter is, zie ook voor mij met vertrouwen de invoering van een Inlandsche Gemeente-ordonnantie in meergenoemd gewest tegemoet en geef ik Uwe Excellentie eerbiedig in overweging daartoe over te gaan. Voor Palembang (meen ik) te mogen aanbevelen eene

ordonnantie, welke de gemeente-ordonnantie voor Banka opgenomen in Staatsblad 1919 No. 453...

Sumber: Ag. 41763/1919; Bt. 12 Desember 1919 No. 64A; GB. Bt. 7 Desember 1927 No.2

Abstraksi :

2.1 Surat dari Direktur Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Jenderak tanggal 28 Oktober 1919 No. 1248/Btg.

Residen Palembang datang pada rapat yang membicarakan mengenai penetapan peraturan daerahnya bagi penduduk pribumi. Ide mengenai peraturan itu pada mulanya datang dari Brautigam, kemudian diteruskan oleh Whitlau. Selain Palembang, Banka juga mendapatkan perhatian untuk mengadakan penetapan peraturan daerahnya. Penduduk Palembang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan Banka, oleh karena itu penetapan peraturan sebaiknya lebih dititik beratkan pada Palembang.

2.2. Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 5 Desember 1919

Geen bezwaar hebbende tegen het door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur bij brief van 28 October jl. No. 12487/Btg gedaan voorstel, adviseert de Raad van Nederlandsch Indie; daaraan gevolg te geven met verstelling en afkondiging van eene ordonnantie overeenkomstig het overgelegd ontwerp, zooals dit met rode inkt is gewijzigd.

Met het oog op artikel 29 van het Regeeringsreglement geeft de Raad van Nederlandsch Indie in overweging ten aanzien van de vaststelling der ordonnantie in overeenstemming met hem te beslissen.

Sumber : Kl. 20 Nopember 1919 No. 41763; Bt. 12 Desember 1912 No. 64A; GB. Bt. 7 Desember 1927 No. 2

Abstraksi :

2.2 *Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 5 Desember 1919.*

Tidak ada keberatan dari Dewan Hindia Belanda terhadap surat dari Direktur Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1919 No. 12487 mengenai usul penetapan peraturan sesuai dengan artikel 29 dari peraturan pemerintah.

2.3. *Surat dari Residen Palembang ditujukan kepada Direktur Dalam Negeri di Weltevreden, tanggal 8 April 1919, No. 5522/1927*

Met verwijzing naar Uw Schrijven ddo: 28 Maart jl. No.: 3530/Btb en ten vervolge van dezer. Telegram ddo.: 7 April jl. No. : 78 deel ik U Hoog Edel Gestrenge beleefd mede, dat ik de overkomst van den heer Whitlau niet noodig oordeel. Principieel is de aangelegenheid door ZedGestr. Met mij en meerdere ambtenaren in mijn gewest besproken en ten aanzien van de regeling zelve kan ik mij vereenigen met de redactie der verschillende artikelen der ontwerp ordonnantie, zoals die mij is toegezonden.

Algemeen is door mijne ambtenaren den heer Whitlau

opgemerkt geworden, dat naar hunne meening het peil van ontwikkeling in het bij zonder de belangstelling der bevolking in deze aangelegenheid nog onvoldoende zijn voor de invoering eener regeling van de huishoudelijke belangen der Inlandsche Gemeenten.

De invoering kan derhalve geschieden in :

1. De afdeeling Palembangsche Benedenlanden
2. De afdeeling Palembangsche Bovenlanden
3. De afdeeling Ogan Oeloe en Koming

De onderafdeeling Rawas der Palembangsche Benedenlanden is over het algemeen te achterlijk dan dat van invoering iets te hopen is. Verreweg de meeste hoogere en lagere hoofden in dat ressort laten ten aanzien van ontwikkeling en belangstelling nog alles te wenschen over.

In de onderafdeeling Pasemahlanden is de invoering thans nog minder doelmatig, omdat in dat ressort het margaverband niet inheemsch is, maar eerst + 15 jaren geleden door on ingesteld. Teneinde eene proef te nemen zou de invoering in de marga Soembai Besar Soeko Aloen Doea (omvat de hoofdplaats Pager Alam) kunnen geschieden, opdat dermate in de volkshuishouding heeft ingeleefd, dat op dien basis verder voorwerken in het lokaal voortwerken in het lokaal belang der doesoens mogelijk is.

Voor het onderdistrict Moelak der Pasemahlanden is de uitzondering niet nodig, naar de daarin gelegen marga's tot voor de reorganisatie van 1918 bij de onderafdeeling Lematang Oeloe waren in gedeeld.

Sumber : Ag. 41763/1919; Bt. 12 Desember 1919 No. 64 A; GB. Bt. 7 Desember 1927 No. 2

Abstraksi :

2.3 Surat dari Residen Palembang ditujukan kepada Direktur Dalam Negeri di Waltevreden, 8 April 1919, No. 5522/1927.

Whitlau menekankan bahwa taraf perkembangan daripada kepentingan penduduk di daerah Palembang masih belum mencukupi untuk melaksanakan peraturan otonomi daerah. Di Palembang, perkembangan dan kepentingan di kebanyakan marga masih belum mencukupi. Kehidupan di sana masih sangat sederhana, kesejahteraan penduduk masih tercukupi. Daerah-daerah yang dibagi dalam otonomi adalah sebagai berikut :

- I. Palembang bagian bawah
 - a. Banjoeasin dan Koeboestreken, kecuali Pangkalan Balai dan Bajoeng Lencir
 - b. Moesi Ilir
 - c. Ogan Ilir
- II. Palembang Bagian Atas
 - a. Lematang Ilir
 - b. Lematang Oeloe
 - c. Tebing Tinggi
 - d. Moesi Oeloe, kecuali Rawas
 - e. Pasemahlanden, kecuali Pager Alam, Samidang dan Bandar
- III. Ogan Oeloe dan Komering
 - a. Komering Ilir
 - b. Komering Oeloe

- c. Ogan Oeloe
- d. Moeara Doea

Untuk daerah Pasemahlanden, pemasukan penetapan daerah ini sekarang sedikit kurang dari tujuan, karena daerah ini adalah daerah kekuasaan Pemerintah Belanda disekitar 15 tahun yang lalu dan hubungan marganya bukanlah pribumi.

2.4. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1927 No. 2

Te bepalen, dat de Inlandsche Gemeénte ordonantie voor Palembang (Staatsblad 1919 No. 814) voor de in de onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrecken gelegen marga s Koeboe Lalan, Koeboe-Bajat, Koeboe-Toengkal, Penoegoean, Dawas, Soepat en Toengkal-Iilir en de in de onderafdeeling Moesi Oeloe gelegen marga s Batoekoening Lakitan en Soekoe Tengah Lakitan Oeloe in werking treedt met ingang van 1 Januari 1928.

Sumber : Ag. 38778/1927; G.B. BT.7 Desember 1927, No. 2

Abstraksi :

2.4 Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1927 No. 2

Disetujui dan dipahami. Ditentukan bahwa ordonansi desa pribumi untuk wilayah Palembang (yang diundangkan melalui **Staatsblad** 1919 No. 814) khususnya untuk wilayah **onderafdeling** Banjoeasin dan wilayah Koeboe di mana terdapat marga-marga Koeboe Lalan, Koeboe Bejat, Koeboe

Toengkal. Penoegoean, Rawas, Soepat dan Toengkal Ilir. Juga di onderafdeling Musi Ulu di mana terdapat marga-marga Batoekoening Lakitan dan Soekoe Tengah Lakitan Oeloe. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 1928.

2.5. Surat dari Residen Palembang ditujukan kepada Gubernur Jenderal, tanggal 27 Oktober 1927 No. 11373/1928

De redenen, die er indertijd toe hebben geleid, een 9-tal marga s dezer residentie, t.w.:

Koeboe-Lalan, Koeboe-Bajat, Koeboe-Toengkal, Penoegoean, Rawas, Soepat en Toengkal-Ilir in de Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrecken (Afdeeling Palembangsche Benedenlanden), zoomede :

Batoekoening Lakitan en Soekoe Tengah Lakitan Oeloe der Onderafdeeling Moesi Oeloe (Afdeeling Palembangsche Bovenlanden),

Uit te sluiten van de werking der Inlandsche Gemeenteordonantie in Staatsblaad 1919 No. 814, waren voornamelijk, de groote achterlijkheid in beschaving en het analfabetisme der bevolking, waardoor het moeilijkheid gaf raadsleden te vinden, die in staat zouden zijn, behoorlijk kennis te nemen van de geschreven stukken en ander bescheiden geproduceerd, ter vergadering van de betrokken margaraden.

Sedert is daarin echter grooter verandering ten goede gekomen; in alle der genoemde marga's zijn reeds jaren geleden volksscholen opgericht, waarvan de abiturienten behoorlijk lezen en schrijven kunnen.

In de bestuursvoering is met opzet, nimmer eenig onderscheid gemaakt, tusschen de hooger met name genoemde marga's en de overige Inlandsche

gemeenschappen in de Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrecken en Moesi Oeloe.

Reede gedurende een 5-tal jaren, hebben de z.g. uitgesloten marga's, zoo goed als de overige autonomie ressorten in deze residentie, telken jare eene begrooting ter goedkeuring ingediend, opgemaakt door eenen raad, waarbij als in de andere Inlandsche gemeenten, de Pasirah als voorzitter fungeerde en de dorpshoofden als leden zitting hadden.

Sumber : Ag. 38778/1927; GB. Bt. 7 Desember 1927 No. 2

Abstraksi :

2.5 Surat dari Residen Palembang ditujukan kepada Gubernur Jenderal, tanggal 27 Oktober 1927 No. 11373/1928

Penerapan kontrak perjanjian terhadap ordonansi desa pribumi terhadap 9 marga di Keresidenan Palembang.

Dalam pembicaraan terdahulu tentang kedudukan 9 marga di residensi ini yang meliputi : - Koeboelalan, Koeboe Bajat, Koeboe Toengkoel, Penoegeohan, Rawas, Supat dan Tungkal Ilir, semua ini berada di **onderafdeeling** Banjoeasin dan wilayah Koeboe (**afdeeling** Palembang Bawah).

- Batukuning, Lakitan dan Suku Tengah Lakitan Ulu yang berada di **onderafdeeling** Musi Ulu (**afdeeling** Palembang Atas).

Ini merupakan realisasi dari ordonansi desa pribumi yang diundangkan dalam **Staatsblad** 1919 No. 814, terutama terhadap keterbelakangan yang besar atas pendidikan serta rakyat yang buta huruf, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan anggota Dewan Penasihat yang dapat menulis dalam rapat-rapat marga.

Tetapi, sejak berlakunya ordonansi itu, beberapa tahun yang lalu telah dibuka sekolah-sekolah rakyat di mana muridnya telah dapat baca tulis (membaca dan menulis).

Selama 5 tahun terakhir ini, apa yang disebut marga tertutup telah menjadi Resort Otonom di residensi ini.

2.6. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 27 Desember 1927 No. 2

Is goedgevonden en verstaan :

Eerstelijk: In overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indie vast te stellen de volgende zes ordonnantie en te gelasten dat zij zullen worden afgekondigd door plaatsing in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie op deze wijze:

Ten tweede : Den Resident van Palembang op te dragen om ten aanzien van de terreinen, bedoeld in artikel 4 van de ordonnantien van heden (Staatsblad Nos. 350, 351 en 352) te handelen in den geest van den brief van den 1sten Gouvernements Secretaris van 10 September 1907 No. 2480.

Ten derde : Te bepalen dat het lidmaatschap.

- a. Den plaatselijken raad van de onderafdeeling Ogan Ilir.
- b. Den plaatselijken raad van de onderafdeeling Komering.
- c. Den plaatselijken raad van de onderafdeeling Lematang Ilir. a,b,en c, Verbonden is aan de volgende ambten, uitgeoefend die onder afdeeling :

1e. districtshoofd;

2e. onderdistrictshoofd, alleen b. Uitgezonderd dat van onderdistrictshoofd Kajoe Agoeng; a,b,en c margahoofd.

Ten vierde : Te bepalen dat de overgelegde uitgewerkte staten ter toelichting van de begrotingen van uitgaven en ontvangsten van de onderafdeelingen Ogan Ilir, Komering Ilir en Lematang Ilir voor het dienstjaar 1918 (Staatsblad 1918 No. 353, 354 en 355), zullen worden opgenomen in de Javasche Courant.

Ten vijfde : Aan de onderafdeeling : Ogan Ilir, Komering Ilir, Lematang Ilir, toe te kennen eene tegemoetkoming ten bedrage van f7500, f2000, f4000 in de kosten van onderhoud van bruggen en wegen en daarmee verband houdende werken gedurende de manden Juli tot en met December 1918.

Ten zesde : Den Adviseur voor de decentralisatie te machtigen om bij zijne bijdrage voor de begroting van 1920 rekening te houden met eene verhooging van de voor de onderafdeelingen Ogan Ilir, Komering Ilir, en Lematang Ilir uit de algemeene geldmiddelen afgezonderde bedragen met onderscheidenlijk f 15000.-, f 4000.- f 8000.-s jaars.

Ten zevende : Den Directeur van Financien uitdigen voor de aanwijzing van het artikel, ten laste waarvan de in artikel van dit besluit bedoelde uitgaven dit te worden gekweten, het hoodige te ten of voor te stellen.

Sumber : Bt. 27 Desember 1927 No. 2

Abstraksi :

2.6 Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 27 Desember 1927 No. 2

Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 27 Desember 1927 no.2, yang antara lain berisi:

- Menentukan anggota untuk: daerah Ogan Ilir, Komeriing, Lematang Ilir
- Pengeluaran dan pemasukan uang di daerah Ogan Ilir, Komeriing Ilir dan Lematang Ilir untuk tahun 1918 akan diberitakan di Javasche Courant.
- Ongkos perawatan jembatan dan jalan untuk bulan Juli
- Desember 1918

BAB III
DAERAH LOKAL
(LOCALE RESSORTEN)

3.1. *Konsep Surat Keputusan tentang pemilihan anggota dewan lokal, 1923*

Dat Hy, nadere wijziging van Locale raden ordonantie (Staatsblad 1905 No. 181) laatstelijk gewijzigd bij de ordonnantie van 19 October 1922 (Staatsblad 664) wenschelijk achtende, ten einde bij vermeerdering van het aantal te benoemen of te kiezen leden van locale raden eene dadelijk te maken. En voorts rekening willende hoeden met de intrekking van het in artikel 33 genoemde reglement in Saatsblad 1809 No. 209, Heeft goedgevonden en verstaan :

Artikel I

- I. In lid 6 van artikel 10 der Locale raden ordonnantie, zooals dat artikel luidt ingevolge de ordonnantie van 19 Januari 1908 (Staatsblad No. 52), vervallen de woorden: en worden de open plaatsen bij de eerstvolgende periodieke benoeming of verkiezing vervuld.
- II. Het slot van het eerste lid van artikel 33 an de Locale raden ordonnantie zooals dat luidt ingevolge artikel I der ordonnantie van 21 Juni 1909 (Staatsblad No.335), wordt gelezen: de overige leden op den voet van de bepalingen, voor Europeesche burgerlijke landsdienaren geldend, met dien verstande dat zij, geen bezoldiging uit s Land kas ontvangende, worden gerangschikt in

de 2de klasse, vermeld in artikel 2 van het Algemeen Reisreglemen.

Artikel 2

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkonding. Werkt ten aanzien van artikel 1 & II terug tot 1 Augustus 1921.

Sumber : Tzg.Ag. 21283/1923

Abstraksi :

3.1 Konsep Surat Keputusan tentang Pemilihan Anggota Dewan lokal 1923.

Diputuskan bahwa akan ditambah sejumlah anggota Dewan Lokal dengan pemilihan dan pengangkatannya, sesuai dengan peraturan tanggal 19 Oktober 1922 (**Staatsblad** No. 664).

3.2. Saran dari Dewan Hindia Belanda yang dibawakan dalam rapatnya tanggal 19 Oktober 1917 No. XXI

1. De raad van Nederlandsch-Indie heeft gemeend omtrent het voorliggende voorstel tot toepassing van artikel 68a lid 1 van het Regeeringsreglement op de onderafdeelingen Ogan Ilir, Komering Ilir en Lematang Ilir, der residentie Palembang onderhands het gevoelen van het Hoofd der afdeeling Buitenbezittingen en den Directeur van Binnenlandsch Bestuur te moeten vragen.
2. Uit de hierbij overgelegde nota van den heer Knaap met

onderschrift van den heer Carpentier Alting blijkt, dat beide autoriteiten in beginsel met het voorstel kunnen instemming maar niet in alleen deele kunnen medegaan met de uitwerking, die het denkbeeld in de adviezen van het Hoofd van gewestelijk bestuur en den Adviseur voor de decentralisatie heeft gevonden.

3. De opmerkingen van de heeren Knaap en Carpentier Alting zijn naar het inzien van het College alleszine de overweging ware en de Resident van Palembang ware daarom te doen uitnoodigen ter zake tusscheenkomst van Mr. Kindermann van zijn meening te doen blijken.
4. Dit behoeft niet te beletten dat al dadelijk aan het Opperbestuur in overweging wordt gegeven om zoo mogelijk nog bij de ontwerp-begrooting voor 1918 met den maatregel rekening te houden. Bij dit - natuurlijk dan telegrafisch te openen overleg zou kunnen worden aangenomen dat het voor elk der in het leven te roepen locale besturen uit de algemeene geldmiddelen af te zónderen bedrag **overeenkomstig** de inzichten van Resident en Adviseur voorshands zal zijn te stellen op f.3500,-s jaars.
5. Uit de nota van den heer Knaap blijkt verder dat zijn inziens:
 - a. Ook onderafdeelingen Moesi Ilir en Pasemahlanden voor toepassing der decentralisatie in aanmerking komen ;
 - b. De instelling van onderafdeelingsraden aan de instelling van een raad ook voor het gewest Palembang niet in den weg behoeft te staan.
6. De Resident ware naar's Raads inziens uit te noodigen ook omtrent het eerste punt nader door tusschenkomst

van den Adviseur voor de decentralisatie van raad te dienen. Uit den brief van den heer Brautigam is niet af te leiden dat voor de beide onderafdeelingen in kwestie instelling van raden bepaald ontraden moet worden.

7. Met betrekking tot het tweede punt sluit het College zich gaarne aan bij de zienswijze van den heer Knaap (vgl. Ook's Raads advies van 17 Augustus jl. No. XIV, verhandeld bij het besluit van 6 September d.a.v. No.3). Terecht betoogt deze dat ook bij instelling van onderafdeelingsraden voor een gewestelijken raad ruimschoots **voldoende** te doen zal overblijven. Ook de door den Adviseur tegen de maatregel ingebrachte bezwaren acht het College weinig klemmend. Dat een autonoom gewest Palembang er niet in zou kunnen slagen eigen personeel voor de uitvoering der locale werken te vinden, mag met het voorbeeld van het Cultuur gebied voor oogen, naar's Raads inzien met grond worden betwijfeld; in de samenstelling van den gewestelijken raad, zooals deze door den Resident is ontwerpen, kan men elke wijziging brengen, die noodig is om alle deelen van het gewest en alle groote belangen naar behooren vertegenwoordigd te doen zijn, terwijl het **geraamde** bedrag voor reis-en verblijfkosten van raadsleden op een budget met een eindcijfer van eenige tonnen gouds naar het inzien van het College geen gewicht in de schaal legt.
8. De Raad meent daarom te moeten aanbevelen om bij de ontwerp-begrooting voor 1918 zoo mogelijk eveneens op de afzondering van geldmiddelen voor het gewest Palembang te doen rekenen. Daar niet dadelijk is uit te maken welk bedrag zal zij af te zonderen, zal voorhands met een memorie-post zijn te volstaan. Hiertegen kan naar het inzien van het College geen bezwaar bestaan,

omdat tegenover de verhooging die het Xie hoofdstuk der vermindering der uitgaven op het VIIe hoofdstuk staat.

9. Eventueel zal ook zijn vast te stellen of boven de uitkeering van een vast bedrag niet de voorkeur dient te worden geschonken aan de toekening van een aandeel in de opbrengst van een of meer Landsbelastingen. Met de enkele woorden die Resident hieraan wijdt, is dit punt niet beslist.
10. Tegen het doen afgaan van een uitnoodiging aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur als bedoeld op bldz. 3 van den brief van Mr. Kindermann bestaat naar 's Raads inzien geen bezwaar. Er zal in dit geval rekening mede te houden zijn dat ook binnen de ressorten der onder afdeulingsraden werken bij het Land (waarvoor c.q. het gewest in de plaats zal treden) in uitvoering zullen blijven, **waarvoor** van heerdienstplichtingen gebruik zal worden gemaakt.
11. Ten slotte teekent het college aan dat het zich kan vereenigen met de zienswijze van den Adviseur dat voorlopig niet ware tegemoet te komen aan het verlangen van den Resident om zich het onderzoek van de begrootingsrekeningen der onderafdeelingen alsmede het toezicht op hunne belasting - en strafwetgeving te zien toegewezen.
12. De Raad heeft de eer het vorenstaande te doen dienen als de van hem gevraagde raad en bericht.

Sumber : Kl. 24 September 1917 No. 28617; Bt. 1 Nopember 1917 No. 21; GB. Bt. 7 Desember 1927 No. 2

Abstraksi :

3.2. Saran dari Dewan Hindia Belanda yang dibawakan dalam Rapatnya tanggal 19 Oktober 1917 No. XXI

Berlakunya Undang-Undang Desentralisasi 1903 di **onderafdeeling** Ogan Ilir, Komering Ilir dan Lematang Ilir di Karesidenan Palembang (tentang pembentukan **ressort onderafdeeling** untuk tiap-tiap bagian wilayah tersebut).

Dalam saran yang diberikan oleh Dewan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal tentang pembentukan resort tingkat **onderafdeeling** sebagai realisasi Undang-Undang Desentralisasi 1903 di wilayah Keresidenan Palembang, meliputi 12 hal antara lain bahwa:

- Dewan Hindia Belanda bermaksud mempraktekkan usul pelaksanaan artikel 68a point 1 dari **regeering reglement** untuk wilayah-wilayah Ogan Ilir, Komering Ilir dan Lematang Ilir semua itu berada di Keresidenan Palembang. Untuk itu harus menanyakan bagaimana pendapat dari kepala **Afdeeling Buiten Bezittingen** dan Direktur Dalam Negeri.
- Nota perundingan tuan Knaap ternyata sesuai dengan tulisan tuan Carpentier Alting, bahwa kedua bentuk kekuasaan itu pada prinsipnya disetujui.
- Pernyataan Knaap dan Carpentier Alting itu setidaknya harus mendapat persetujuan dari College.
- Dari nota yang diajukan Knaap selanjutnya terbukti bahwa di **onderafdeeling** Musi Ilir dan Daerah Pasemah perlu dipraktekkan desentralisasi.

3.3. Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 24 Juni 1918

Aannemende dat de bij het Indisch telegram van 6 dezer No.231 voorgestelde wijziging van artikel 1 van het Decentralisatiebesluit de instemming van het Opperbestuur zal wegedragen en overigens geen bezwaar hebbende tegen opvolging der voorliggende voorstellen van den Adviseur voor de decentralisatie, adviseert de raad van Nederlandsch Indie, daaraan gevolg te geven met vaststelling en afkondiging van een zestal ordonnanties overeenkomstig der overgelegde ontwerpen, zooals zij met rooden inkt zijn gewijzigd.

Met het oog op artikel 29 van het Regeeringsreglement geeft de Raad van Nederlandsch-Indie in overweging ten aanzien van de vaststelling der ordonnanties in overenstemming met hem te beslissen.

Sumber : Kl. 13 Juni 1918 No. 15858; Bt. 27 Juni 1918 No. 8; G.B. Bt. 7 Desember 1927 No. 2

Abstraksi :

3.3 Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 24 Juni 1918.

Ketentuan dewan onderafdeling untuk Ogan Ilir, Komering Ilir dan Lematang dan ketentuan dari **begroting** serta untuk **locale ressorten** yang baru. Usul yang ada dalam telegram 6 bulan ini No. 231 yang mengacu pada artikel 1 dari **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** oleh pemerintah pusat disetujui dan selanjutnya tidak berkeberatan usul untuk mengganti seperti yang diajukan

oleh Penasihat Desentralisasi dan Dewan Hindia Belanda, apa yang ada dalam rencana pemikiran ordonansi ke 6.

3.4. Memori Serah Terima Jabatan yang dibuat oleh Residen Palembang A.M. Hens 1923

Bij de behandeling der Inlandsche Gemeenteraden werd reeds het een en ander aangeteekend omtrent de Plaatselijke Raden van Ogan Ilir, Komering Ilir en Lematang Oeloe en de maatregelen door mij getroffen, opdat die raden niet langer in den weg staan aan de ontwikkeling van het inlandsche gemeentewezen in die onderafdeelingen.

In een der nota's uitgegaan van het Kantoor voor de Bestuurszaken der Buitengewesten (Conferenties 1922, de toekomstige gedragslijn t.s.v. de inlandsche zelf besturen in de Buitengewesten) werd het een en ander opgemerkt omtrent de localeressorten met overwegend Inlandsch karakter en werd ik bij schrijven van den 1sten Gouvernements Secretaris van 30 Juni 1922 No. 1858/1 uitgenoodigd daaromtrent mijne zien wijze mede te deelen.

Verder gaf ik nog in dien brief het volgende als mijne meening te kennen.

De voornaamste fouten door die Raden gemaakt zijn de volgende: Nog doorgelaten, dat bij de instelling, de gelden en eigendommen der inheemsche gemeenschappen, in beheer werden gegeven aan de ingestelde ressorten het geen m.i./staatsrechtelijk onjuist was (artikel 71 R.R.). Maar waarop ik thans niet wil ingaan zijn die raden op den verkeer den weg blijven doorgaan, niettegenstaande door/ den Directeur van Binnenlandsch Bestuur (brief van 10 October 1918 No, 10707/Btb - vide de reeds meer in deze

memorie aangehaalde nota Staargaard) al dadelijk werd aangegeven hoe in den vervolge te handelen, waar toch de instellingsordonnantie geenszins voorschreef, dat ook in de toekomst de inkomsten der inheemsche gemeenschappen door de instelling die locale raden ten zeerste werden geschaad, hun zelfs het leven onmogelijk werd gemaakt, behoeft hier geen nader betoog.

Sumber : GB. Bt. 7 Desember 1927. No. 2

Abstraksi :

3.4 Memori Serah Terima Jabatan yang dibuat oleh Residen Palembang A.M. Hens 1923

Daerah-daerah yang termasuk dalam perkembangan daerah pribumi adalah Ogan Ilir, Komering Ilir dan Lematang Oeloe. Daerah ini dicatat dalam kantor urusan pemerintah yang menangani daerah-daerah di luar dan ditandai dengan sifat-sifat dari penduduk setempat. Daerah ini masih didominasi oleh tanah milik masyarakat pribumi, oleh karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam bertindak jika ingin menjadikan daerah-daerah itu menjadi daerah lokal yang desentralisasi.

3.5. Saran dari Dewan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal dalam rapat tanggal 7 Maret 1923

1. Het voorstel van den adviseur voor de decentralisatie ontmoet op zich zelf ijgen Raad van Nederlandsch-Indie geen bezwaar.
2. In stede van de leden 6 en 7 van artikel 10 der Locale raden-ordonnantie te vervangen door een lid, kan echter

naar s Raads inzien zonder bezwaar worden volstaan met een schrapping uit lid 6 van de woorden en woeden de open plaatsen bij de eerst volgende periodieke benoeming of verkiezing vervuld. Ook op deze wijze wordt het doel bereikt terwijl vernummering van lid 8 vermeden wordt.

Sumber : Kl. 9 Pebruari 1923 No. 3875; Tzg. Ag 21283/1923

Abstraksi :

3.5 *Saran dari Dewan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 7 Maret 1923*

Usul dari Dewan Penasehat Hindia Belanda mengenai desentralisasi dapat diterima dan pengangkatan atau pemilihan anggota akan dilaksanakan pada periode selanjutnya.

BAB IV

PERLUNYA DIBENTUK KOTAPRAJA (GEMEENTE)

4.1. Surat pengantar dari Walikota Batavia ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 27 Maret 1923 No. 1954.

Naar luid van berichten, de laatste dagen in de pers verschenen, zou de Regeeringscommissaris Bestuurshervorming aan Uwe Excellentie hebben toegezonden o.a. een ontwerp van een nieuwe-gemeente ordonnantie voor die gemeenten, welke na **invoering** van de provincie daarbinnenkomen te liggen en die dus in eene sterk gewijzigde verhouding tot het Gouvernement zouden komen te staan.

Mocht dit ontwerp inderdaad voor Uwe Excellentie een punt van overweging uitmaken, dan heb ik de er Haar eerbiedigte verzoeken, de daarbij betrokken Locale Raden wel de gelegenheid te willen openen, van hunne meening terzake te doen blijken.

Sumber: Bgs. 3 Juli 1923 No. 1580/II; G.B. Tzg. Ag. 986/1926.

Abstraksi :

4.1 Surat Pengantar dari Walikota Batavia ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 27 Maret 1923 No. 1954.

Walikota Batavia memberikan surat pengantar mengenai masalah peraturan kotapraja yang diperbaharui

diharapkan oleh walikota bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggarisbawahi masalah ini.

4.2. Surat dari Komisaris Pemerintah ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1925 No. 268.

Bij den mij in afschrift bekenden Indischen brief van 6 September j.l. No. 665/5 is de Minister van Kolonien Uwe genoodigd een Koninklijk besluit te willen uitlokken overeenkomstig het daarbij aangeboden ontwerp tot wijziging van het Decentralisatie-besluit ten einde, in afwachting van de tot standkoming van een afzonderlijke stadsgemeente-ordonnantie, in samenhang met een hier te lande te bewerkstellingen wijziging van de Locale Raden-ordonnantie, de positie der gemeenten binnen de provincie West-Java voorhands op de basis van artikel 68a van het Regeerings-reglement te regelen.

Sumber : Bt. 23 Desember 1925 No. 4; G.B. Tzg.Ag. 986/1926

Abstraksi :

4.2 Surat dari Komisaris Pemerintah ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1925 No. 268.

Dijelaskan dalam surat tanggal 6 September 1925 No. 665/5 mengenai kedudukan kotapraja di dalam Propinsi Jawa Barat sesuai dengan artikel No. 68a Peraturan Pemerintah.

Ternyata menteri masih belum menerima berita tersebut dan mohon agar Menteri Kolonial diberikan telegram sehingga dapat segera mengetahui beritanya.

4.3. Salinan Telegram Menteri Koloni untuk Kantor Algemeene Secretarie 1925 tentang kelanjutan Peraturan posisi kotapraja di wilayah propinsi

Bij het voorliggend schrijven van den Regeerings-Commissaris voor de Bestuurshervorming van 3 December j.l. No. 268 wordt er de aandacht op gevestigd dat van den Minister van Kolonien nog geen antwoord is ontvangen op den Indischen brief van 6 September j.l. No. 665/5, waarbij dien Staatsman werd verzocht een Koninklijk besluit uit te lokke tot wijziging van het Decentralisatie-besluit tot voorloopige regeling van de positie der stadsgemeenten binnen provincien.

Deze brief werd door de afdeeling aangehouden tot de ontvangst van de laatste mail per S.S. Tabanan .

Sumber: Ag. 35460/1925; Bt. 23 Desember 1925 No. 4; G.B. Tzg. Ag. 986/1926

Abstraksi :

4.3 Salinan telegram Menteri Koloni untuk kantor Algemeene Secretarie 1925 tentang kelanjutan peraturan posisi kotapraja di wilayah propinsi.

Menteri Kolonial masih belum menjawab mengenai permohonan pejabat pemerintah tentang masalah **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** untuk menjadi pemerintahan sementara kotapraja dalam propinsi . Surat ini dikirim melalui Kantor telepon Tabanan.

4.4. Telegram dari Menteri Koloni ditujukan kepada kantor Algemeene Secretarie tanggal 10 Desember 1925 No.751.

Uw negenendrie daar volgende alineas artikel achste decentralisatie besluit als afgekondigd in staatsblad eennegennulvijf niet geheel overeenkomst met volgorde origineel besluit is bij artikel een koninklijk besluit dato helf een dezer nummer zestwee artikel achttien zyn geheel opnieuw vastgesteld gewijzigd overeenkomst depeche zes September punt artikel een luidt dubbelpunt artikel achttien van het decentralisatiebesluit komma zoöals dit artikel luidt ingevolge ons besluit van zes Januari negentienelf nummer driezes haakje indisch staatsblad nummer tweedriezes haakje koma wordt nader geleg alsvolgt dubbelpunt voor elk gewest of gedeelte van een gewest komma waarvoor een raad is ingesteld komma wordt de eerste begrooting van ontvangsten en uitgaven bij ordonnantie vastgesteld punt

Sumber: Bt. 23 Desember 1925 No. 4; Tzg.Ag. 986/1926

Abstraksi :

4.4 Telegram dari Menteri Koloni ditujukan kepada kantor Algemeene Secretarie tanggal 10 Desember 1925 No. 751.

Membicarakan tentang artikel 18 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** seperti isi artikel Surat Keputusan tanggal 6 Januari 1911 No.36 (dalam **Staatsblad** No. 2360) untuk masing-masing daerah yang akan menerima dan mengeluarkan keuangannya yang pertama sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4.5. Saran dari Dewan Hindia kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 18 Agustus 1925

De voorloopige voorzieningen, doc. Regeerings Commissaris voor de bestuurshervorming bij zijn inliggend schrijven aanbevolen ten einde de decentralisatiewetgeving te doen aanpassen aan de instelling van provincies in welker gebied stadsgemeenten gelegen zijn, ontmoeten bij den Raad van Nederlandsch Indie in beginsel geen bezwaar.

De voorgestelde tydelijke oplossing ligt geheel in de lijn van hetgeen werd opgemerkt in het Raadsadvies van 13 Augustus 1924 No. XVII, waarvan de strekking door den heer Stibbe in zoover is misverstaan, dat hij het ten onrechte doet voorkomen als zoude het misverstaan, dat hij het ten onrechte doet voorkomen als zoude het College in beginsel zich er tegen hebben verzet de stadsgemeenten onder de werking van artikel 67c van het Regeeringsreglement te brengen. De Raad wilde deze aangelegenheid nader overwogen zien nadat de bestuurshervorming haar beslag zou hebben gekregen, en opperde alleen bezwaren tegen een dadelijke algemeene verandering van de inrichting van de stadsgemeenten, welke bezwaren bevestiging vinden in den brief van de wd. Adviseur voor de decentralisatie van 21 Januari 1925 No. 114/Z en thans den Regeeringscommissaris zelf ertoe hebben geleid een overgangsvoorziening voor te stellen.

Ter vervanging van het overgelegd ontwerp-Koninklijk besluit heeft het College een nieuw ontwerp, gemerkt R., samengesteld, omdat de door den Regeeringscommissaris voorgestelde redactie van de te wijzigen bepalingen van artikel 18 van het Decentralisatie-besluit, daargelaten nog dat de duidelijkheid daarvan te wenschen laat, geen rekening houdt met de mogelijkheid dat geen college van

gedepunteerden ingesteld wordt (verg. Artikel 67a, lid 5 van het Regeeringsreglement), in welk geval de goedkeuring van gemeente begrotingen door den Provincialen Raad zal moeten geschieden.

Sumber: Cl. 18 Agustus 1925 No. 22948; G.B. Tzg.Ag. 986/1926

Abstraksi :

4.5 Saran dari Dewan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 18 Agustus 1925.

Pembaharuan pemerintahan disesuaikan dengan keadaan di propinsi untuk perubahan mengenai Surat Keputusan Kerajaan, College mempunyai masalah baru disebut R (sic: R adalah perbaikan Surat Keputusan Kerajaan menjadi suatu hal baru), disusun, karena ketentuan artikel 18 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** diusulkan oleh Komisaris Pemerintah.

4.6. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Tanggal 6 September 1925 No. 5

Is Goedgevonden en verstaan:

Aan Den Heer Minister van Kolonien.

Bij schrijven van 23 Augustus 1924, 4de Afdeling No. 6/1096 heeft Uwer Excellenties ambtvoorganger uitdrukkelijk bekend gesteld dat naar zijne meening de provincie zullen moeten worden omgevormd tot gemeenschappen op de basis van artikel 67c van het Regeeringsreglement. Naar aanleiding hiervan heeft de

toenmalige wd. Adviseur voor de Decentralisatie in zijn onder nummer 1876 van het loopend mailrapport in afschrift overgelegden brief van 21 Januari j.l. No. 114/Z met betrekking tot de wijze waarop de positie der stadsgemeenten in het provinciaal verband moet **worden** geregeld in overweging gegeven om te beslissen dat in beginsel wordt aangenomen de gemeenten in de provincies te brengen onder de werkingsfeer van evengenoemd artikel van het Regeeringsreglement en dat eerst na de instelling van den provinciale en de regentschapsraden in West-Java de herziening van de decentralisatie-wetgeving met het oog op den evenbedoelde principieele beslissing aan de orde behoeft te komen.

Sumber: Bt. 6 September 1925 No. 5; G.B. Tzg. Ag. 986/1926

Abstraksi :

4.6 Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 6 September 1925 No. 5.

Dalam Surat Keputusan tanggal 6 September 1925 No.5 ditetapkan bahwa kotapraja dalam suatu propinsi akan dibentuk sesuai dengan artikel 67c Peraturan Pemerintah. Sesudah pembentukan propinsi dan kabupaten di Jawa Barat, akan diadakan pembaharuan perundangan desentralisasi.

4.7. Nota dari Algemeene Secretarie 1923

Nieuwe stadsgemeente-ordonnantie.

De R.C.B.H. diende bij brief van 7 Februari No. 22 (ag. 5357) een ontwerp in voor een stadsgemeente-ordonnantie,

uit tweedemotief: 1ste. Omdat de stadsgemeenten bij doorvoering van de bestuurshervorming aan een andere macht zullen onderworpen zijn dan thans en ook op andere punten hun positie zal veranderen; 2 de. Omdat er een beslissing aanhanging is bij de Regeering in het oude twistpunt: welke plaats zal de burgemeester in de gemeente in de toekomst kunnen innemen (politietak der gemeente), in welke verhouding zal hij staan tot de organen van het landsgezag (handhaving van het hoofd van plaatselijk bestuur).

Deze brief sloot aan een vorigen van 25 Januari No. 15, welke evenwel ter Alg. Secretarie niet bekend was, immers ingezonden d/t B.B. en Dec. Op verzoek werd een afschrift toegezonden, dat thans hierbij is gevoed (ag. 5819/23). Daaruit blijkt, dat de ontwerpen stadsgemeente-ordonnantie anticipeert op een beslissing der Regeering in zake de voorstellen Cohen (van Gigch) over de hervorming van het bestuur op de groote hoofdplaatsen. Die voorstellen gaan en van uit dat het hoofd van plaatselijk bestuur als zelfstandige autoriteit blijft. De Dir. B.B. in zijn daarover handelend advies van 21-12-22 wil den burgermeester maken tot hoofd van plaatselijk bestuur. In dit netelige en belangrijke vraagstuk moet dus eerst een beslissing worden genomen, een beslissing die tevens reikt tot de vraag hoepter handelen met de zgn. Stadskampongs

Sumber: Ag. 5357, 5819/1923; Ag.19 September 1923 No. 2201/II; GB. Tzg. Ag. 986/1926

Abstraksi :

4.7 Nota dari Algemeene secretarie 1923

Ada 2 motif mengenai masalah peraturan kotapraja yang harus diperbaharui, yaitu :

verslag op de XI de afdeeling der thans bij den Volksraad in behandeling zijnde ontwerpbegrooting getuigt hiervan. De memorie van antwoord moest dien tengevolge aanvangen met de woorden: De Regeering ontkent krachtig dat er grond bestaat voor de veronderstelling dat zij de decentralisatie-gedachte niet langer welgezind zou zijn .

Sumber: Bgs. 3 Juli 1923 No. 1580/II; Tzg.Ag. 986/1926

Abstraksi :

4.8 Saran dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 25 Juni 1923 No. 916/2.

Yang harus diperhatikan mengenai pemerintahan kotapraja adalah usul dari komisaris pemerintah untuk pembaharuan pemerintahan sehubungan dengan posisi kotapraja di propinsi yang akan datang, dan tugas walikota dan kepala pemerintahan setempat.

Masalah keuangan yang dilaporkan dalam laporan daerah juga menjadi hal yang harus ditinjau kembali.

4.9. Saran dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 24 Juli 1923 No. 1078/2

De bij vorenaangehaalde zendbrieven in mijne handen gestelde ontwerp-stadsgemeente-ordonnantie van den Regeerings-Commissaris voor de bestuurshervorming met de toelichtende beschieden, en de daarover handelende brieven van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 17 Mei 1923 No. 4818/A.I. en van Mr. Cohen van 13 Juli 1923 No. 61, geven mij aanleiding tot de volgende opmerkingen.

- I. Een afzonderlijke ordonnantie, naast het Decentralisatie-Besluit en de Locale raden ordonnantie acht de

Regerings-Commissaris noodig en de Directeur van Binnenlandsch Bestuur sluit zich hierbij aan.

- II. De heer Cohen vermeldt in de inleiding der bij het ontwerp gevoegde memorie van toelichting (alineá's 1 tot 5), dat reeds nu getuigd kan worden dat het Decentralisatie-besluit en de Locale raden ordonnantie niet met passen in het kader van de tegenwoordige ontwikkeling, en dat zij stellig geen ruimte aanbieden voor toekomstigen groei onder het nieuwe stelsel, en voorts dat het ontwerp-provinciale-ordonnantie van de stadsgemeenten, rechts gemeenschappen, met autonomie en medebestuur toegerust, maakt, zoodat zij ook wettelijk niet meer onder de gedeelten van gewesten met eigen financieele zelfstandigheid, zooals artikel 68a van het Regeerings reglement ze opvat, kunnen gebracht worden, aangezien zij in hun nieuw gewaad slechts passen onder gedeelten van provincien als zelfstandige gemeenschappen aangewezen, zooals artikel 67c van het Regeeringsreglement aangeeft.
- III. Ik meen mij van eene artikelsgewijze, nauwkeurige examinatie van de ontworpen gemeente-ordonnantie te moeten onthouden. Vooreerst omdat de inmiddels gewijzigde inzichten van Mr. Cohen inzake de taak der burgemeesters eene aanmerkelijke omwerking der ontwerp-ordonnantie noodig maken en eene omwerking in weer anderen zin nodig zal zijn, wanner door de Regeering mocht worden ingestemd met de denkbeelden, welke door den Directeur van Binnenlandsch-Bestuur en mij worden voorgestaan inzake de positierегeling van den burgemeester, terwijl ten slotte een geheel ander ontwerp van veel beperkter omvang te verwachten is, wanner overeenkomstig de hiervoren onder sub I door mij uiteengezette zienswijze wordt beslist. Behoudens het advies van den Raad van

Nederlandsch-Indie moge Uwer Excellentie eerbiedig in overweging gegeven worden:

Den Regeerings-Commissaris voor de Bestuurshervorming te doen uitnoodigen eene ontwerp-regeling te willen indienen als hiervoren sub 1 bedoeld, waarbij wordt uitgegaan van het beginsel dat de taak van het hoofd van plaatselijk bestuur bestemd is op den burgemeester over te gaan; de aldus samengestelde ontwerp-regeling, vergezeld van eene toelichting, welke een volledige beoordeeling daarvan mogelijk maakt, aan den gemeenteraden te doen met verzoek terzake van hun gevoelen te willen doen blijken.

Sumber: Bgs. 3 Juli 1923 No. 1580/II

Abstraksi :

4.9 Saran dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 24 Juli 1923 No. 1078/2.

Menurut surat dari Direktur Dalam Negeri tgl. 17 Mei 1923 No.4818/AI dan surat Mr. Cohem 13 Juli 1923 No.61, ditekankan mengenai:

1. Peraturan khusus disamping **Surat Keputusan tentang Desentralisasi**, dan peraturan anggota setempat.
2. **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** dan peraturan anggota setempat tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang, karena itu diperlukan suatu peraturan baru yang memuat tentang peraturan propinsi kotapraja, peraturan peradilan dengan otonomi setempat dan mengatur masalah keuangan sendiri.

3. Pemilihan anggota dewan
4. Tugas pemerintahan secara umum

4.10. Surat dari Patih Yogyakarta KRA. Danurejo kepada Residen Jogjakarta tanggal 1 Juli 1905

Saja soeda trima padoeka Kangjeng Toewan ampoenya soerat titah tertanggal 15 Juli 1905 No.77/1 Hal Raat kota. Saja atoer bertaoe Padoeka Kangjeng Toewan, maka saja mengoendjoengi pendapetan tiada pake raat kota, dari sebab djikaloeok pake raat kota, Sri Padoeka Kangjeng Sultan dengan Kangjeng Toewan Resident tida ampoenya koewasa, memberi idin hal pekerdjakan atas keslamatan dan kebaikannja negeri, djadi samoewa hal pekerdjakan keslamatan dan kebaikannja negeri dari Raad kota.

Djikalok tidak pake Raad kota paprintahan hal pekerdjaan keslamatan dan kebaikannja negri , misti Sri Padoeka Kandjeng Sultan, bijantoe dengan Kangjeng Toewan Resident, ongkosnya pakerdjakan, djoega dari Sri Padoeka Kangjeng Sultan, dari sewang djagal, sewang pasar, dan libijan oewang djalan jang soedah ada di kantor dengan sewang dari Kangjeng Governemen, maka jang djadi djedjeneng pekerdjakan Habdidalem, dengan Toewan-toewan jang soedah menjadi bijantoenya Sri Padoeka Kangjeng Sultan dengan Kangdjeng Toewan Resident, tetapi tidak di temtoekan selamanja jang jadi djedjeneng, asal ada pekerdjaan Sri Padoeka Kandjeng Sultan dengan Kandjeng Toewan Resident pilih habdidalem dengan Toewan-toewan njang djadi pakerdjaan.

Sumber : Bt. 13 September 1905 No. 21

Abstraksi :

4.10 Surat dari Patih Yogyakarta KRA. Danoeredjo kepada Residen Yogyakarta tanggal 1 Juli 1905.

Adipati Danoeredjo menulis surat kepada Residen Yogyakarta yang isinya menyebutkan bahwa sebaiknya tidak usah dibangun ibukota karena sultan dan residen tidak mempunyai kuasa untuk memberikan ijin menjamin keselamatan dan kebaikan negeri.

4.11. Surat dari Komisarís Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 16 Mei 1905 No. 553/a

Tot rect begrip van het overgelegd uittreksel uit de notulen der eerste gemeenteraadsvergadering te Meester-Cornelis, voeg ik bij een overzicht van de veranderingen, door den Raad gebracht in het door mij aan zijn Voorzitter gezonden ontwerp van een Reglement van orde, welk ontwerp blijkbaar ongewijzigd ter tafel is gebracht. Bij gemis van een dergelijk stuk kan men niet zeggen dat geheel voldaan was an de bij art. 21 al. 1 der Locale raden-ordonnantie (Staatsblad 1905 No.181) den voorzitter opgelegde verplichting, om in een geval als dit de noodige toelichtende bescheiden, mede te zenden. Ter voorkoming dat op dit punt ongewenste gewoonten worden aangenomen, zal het goed zijn daarop te wijzen.

Het advies van den Resident van Batavia geeft in de eerste plaats aanleiding om in herinnering te brengen, welke beteekenis te hechten is aan art.14 alinea 1 van het Decentralisatie-Besluit (Staatsblad 1905 No.137). In de Memorie van Toelichting van den Minister van Asch van Wyck (Gedrukte stukken Tweede Kamer 1901/02, 229, No.3,

blz.8), leest men, na de uiteenzetting zijner denkbeelden over de wetgevende bevoegdheden, aan de locale raden toe te kennen: Het central gezag zal op de uitoefening dezer wetgevende bevoegdheden het noodige toezicht kunnen houden, indien wordt bepaald dat sommige categorieën van locale verordeningen niet in werking treden, dan nadat zij door de Indische Regeering zijn goedgekeurd, en dat alle andere door de raden vastgestelde verordeningen of genomen besluiten door die Regering kunnen worden geschorst of vernietigd wegens strijd met algemeene verordeningen of met het algemeen belang.

Sumber : Bt. 20 Juli 1905 No. 29.

Abstraksi :

4.11 Surat dari Komisaris Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 16 Mei 1905 No. 553/a.

Dewan Penasehat Residen Batavia menggarisbawahi arti dari artikel 14 alinea 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** (Staatsblad 1905 no. 137). Dalam Memori Penerangan Menteri Van Asch Van Wyck yang telah dicetak pada tahun 1901/02, 229 No.3, hal. 8, dibaca bahwa setelah contoh penjelasannya mengenai wewenang pembuatan undang-undang, ketentuan peraturan yang menyebutkan bahwa pada lid 3 artikel 4 peraturan Dewan Lokal adalah perkecualian yang dibuat dari ketentuan lid 2 artikel 4.

4.12. Surat dari Komisaris Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 5 September 1905 No. 752

Gouvernements-renvooi van 23 Agustus 1905 No. 23171. In mijn schrijven van 10 Nopember 1904 No. 295, kopieliik

overgelegd bij den Indischen bierf van 4 Januari 1905 No. 34/10. Werd met betrekking tot de instelling van een gemeenteraad te Soerakarta aangevoerd, dat van uitoefening van dwang op het Inlandsch vorstenbestuur, in welken noem ook, geen sprake mocht zijn. Daar Uwe Excellentie blijkens brief van den Isten Gouvernements-Secretaris van 4 Januari j.l. No. 46 met deze heeft ingestemd, dient zy m.b. ook ten opzichte van Djokjakarta toegepast.

Derhalve conform den Resident Couperus, met de stukken ter kennis van den Minister Kolonien te brengen als vervolg op den Indischen brief van 5 April j.l. No. 812/14.

Sumber : Bt. 13 September 1905 No. 21

Abstraksi :

4.12 Surat dari Komisarís Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal 5 September 1905 No. 752.

Sehubungan dengan surat komisarís tanggal 10 Nopember 1904 No. 295, membahas mengenai segala sesuatu yang bertalian dengan masalah kotapraja di Surakarta, yang memaksakan pemerintahan raja-raja pribumi.

4.13. Perubahan peraturan Desentralisasi atas struktur organisasi kotapraja berdasarkan Bestuurshervorming 1922.

A. Chronologie.

I. Sedert 1920 hangt een algemeene herziening van het kiesrecht voor de gemeenteraden, strekkende tot:

10. afschaffing van censuskiesrecht, toekening van kiesbevoegdheid aan aangeslagenen in eenige belasting(zonder grens) die zich schriftelijk aanmelden;

20. verleenning van kiesrecht aan de vrouw;

30. in groepen naar het rascriterium.

In 30. is in 1923, in verband met het kiesrechtschema voor den Volksraad, wijziging gekomen: splitsing naar het nationaliteitscriterium. Dit bracht mede dat bij de herziening behalve de kiesordonnantie voor de gemeenteraden (S.1908:43) mede betrokken geraakten het Dec. Bt. en de instellingsordonnanties.

Aan den Minister werd bij Ind. brief 5/6/24-461/37 gevraagd een wijziging van het Dec. Bt. te willen uitlokken tot erkenning van het nationaliteitscriterium.

B. Overzicht

Te behandelen zijn dus :

- a. Een wijziging van het Dec.Bt. en van de L.R.O. voor de opneming van de stadsgemeenten in het provinciaal verband (ontw. Cohen) (stuk 2, Raads advies XVII)
- b. Een wijziging van het Dec.Bt. voor invoering van het nationaliteitscriterium reeds bij den Minister aanhanging (stuk I Raad advies XV).
- c. Een wijziging van kiesordonnantie voor de gemeenteraden, ontw. Cohen waarin verwerkt ontw. Jongeneel (stuk 3, Raads advies XVI jo stuk 1 R.A. XV).
- d. Een wijziging van de instellingsord—ies voor invoering van het nationaliteitscriterium (stuk 1, Raads advies XV).

Sumber: Bgs. 2 September 1924 No. 1958/II; Ag. 28534/24; G.B. Tzg. ag. 15421/ 1925

Abstraksi :

4.13 *Perubahan peraturan Desentralisasi atas struktur organisasi kotapraja berdasarkan Bestuurhervorming 1922.*

Perbaikan pembuatan Undang-Undang Desentralisasi untuk keperluan organisasi dewan kotapraja dalam rangka **Bestuurshervorming**. Dalam uraian ini secara rinci dilaporkan:

- Secara kronologi bahwa sejak 1920 telah ada penambahan perbaikan umum peraturan perundangan pemilihan dewan kotapraja yaitu :
 - * Penghapusan peraturan perundangan tentang sensus pemilihan;
 - * Dalam peraturan pemutihan itu wanita dapat turut dipilih;
 - * Pengakuan adanya kelompok-kelompok berdasarkan kriteria ras (nasionalitas).
- Berdasar hal tersebut di atas maka Dewan Hindia Belanda dalam perundangan umumnya menyebutkan:
 - * Mengacu pada **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** dan L.R.O perlu mengangkat dewan kotapraja ke dalam hubungan dengan propinsi;
 - * Mengacu pada **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** perlu adanya masukan tentang kriteria nasionalitas yang pasti;
 - * Mengacu pada peraturan pemilihan seperti yang diusulkan Cohen;

- * Untuk itu Dewan Hindia Belanda mengusulkan agar usul Cohen tentang perbaikan umum **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** dan L.R.O penanganannya harus dilakukan oleh penasihat desentralisasi.

4.14. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 5 Juni 1924 No. 37

Bij de overweging van de door den toenmaligen adviseur voor de decentralisatie bij schrijven van 12 Maart 1920 No. 310/K (mailrapport 1920 No. 979) ingediende voorstellen tot principieele wijziging van het kiesrecht voor de gemeente raden stuitte mijn ambtsvoorgangen op de moeilijkheid, in welken zin de vraag beantwoord dient te worden of, in verband met de door stellen tot herziening van het kiesrecht, ook voor de gemeenteraden dien te worden aangenomen dat het door artikel 1 van het Decentralisatiebesluit geeischt rassonderscheid bij de samenstelling van die raden behouden moet blijven en diengevolge het kiezerscorps moet gesplitst blijven in afzonderlijke, eveneens naar ras of landaard ondescheiden groepen.

Uit den onder No. 1568 van het mailrapport 1922 overgelegden brief van den 1sten Gouvernements-Secretaris van 20 April 1922 No. 1116/ II bekend is, den Raad van Nederlandsch-Indie verzocht thans nader van zijn gevoelen te doen blijken nopens genoemde principieele voorstellen van den Adviseur voor de decentralisatie.

Aan deze opdracht werd door genoemen hoofdambtenaar voldaan bij zijn onder No. 634 van het loopens mailrapport overgeleg schrijven van 27 Februari jl. No. 257/Z/K/DI, waarbij werden aangebonden:

1. Een ontwerp-Koninklijk besluit tot wijziging van het Decentralisatie-besluit;
2. Eene ontwerp-ordonnantie tot wijziging de instellingsordonnanties van de locale raden;
3. Eene ontwerp-ordonnantie tot wijziging van de kiesrecht ordonnantie.

De Adviseur voor decentralisatie merkt hierbij op, dat de nieuw redactie van artikel 1 van het Decentralisatie-Besluit; zoomeede de ten aanzien de instellingsordonnanties voorgestelde wijziging, ten doeld heeft om ook bij de samenstelling de gemeenteraden de bestaande groepindeeling: Europeanen, Inlanders en vremde Oosterlingen, te vervangen door eene onderscheiding-tusschen Nederlander en andere nederlandsche onderdanen, welke onderscheiding voor den Volksraad en de provinciale en regentschapsraden aanvaard is. Wanneer artikel 1 van het Decentralisatie-besluit zal bepalen dat de locale raden uitsluitend uit Nederlandsche onderdanen zijn samengesteld, zal artikel 5 van het Decentralisatie-Besluit, voorzoover het passief kiesrecht betreft, naar s adviseur meening overbodig worden. De eisch van Nederlandsch onderdaanschap voor benoembaarheid en verkiesbaarheid tot raadslid zal daaruit dan z.i. geschrapt kunnen worden. Ook in artikel 6 der locale raden ordonnantie zouden de worden "Nederlansche onderdanen" naar Mr. Jongeneel voorkomt vervangen kunnen worden door "personen". Hier schijnt er evenwel geen bezwaar tegen te bestaan om ze daar te behouden. Waar het de bedoeling is aan de vrouw voorhands alleen het actief kiesrecht voor de

gemeenteraden toe te kennen (vgl. alinea 6 van het advies van den Raad van Nederlandsch-Indie van 15 Juni 1923 No. IV) zal het woord "manelijke" in artikel 6 der locale raden ordonnantie zijn te handhaven.

Sumber : Bt. 5 Juni 1924 No.37; GB. Tzg.ag. 15421/1925

Abstraksi :

4.14 Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 5 Juli 1924 No. 37.

Prinsip peraturan perundangan pemilihan anggota kotapraja dalam hubungannya dengan pembaharuan peraturan pemilihan tetap mengacu pada artikel 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** yaitu mengenai adanya imbalan terhadap perbedaan nasionalitas untuk anggota Dewan Kotapraja.

Dewan Hindia Belanda tetap mengacu pada usulan prinsipil/pokok yang diajukan Penasihat Desentralisasi. Diperintahkan kepada Jongeneel untuk melaksanakan perbaikan peraturan pemilihan kotapraja yang harus mengacu pada artikel 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** untuk digabungkan pada skema peraturan pemilihan **Volksraad**. Atas perintah ini disampaikan:

1. Gambaran surat keputusan kerajaan yang mengacu pada **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** .
2. Gambaran ordonansi yang mengacu untuk mengadakan ordonansi dewan lokal.
3. Gambaran ordonansi yang mengacu dari ordonansi pemilihan.

**4.15. Peraturan tentang Dewan Kotapraja (Memori
Penjelasan)**

STADSGEMEENTE-ORDONNANTIE.

HOOFDSTUK 1.

Algemeene bepalingen.

Artikel 1.

Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van "Stadsgemeente-ordonnantie".

Artikel 2.

In deze ordonnantie worden onder besluiten mede verstaan verordeningen.

Artikel 3.

1. De steden, liggende binnen het gebied eener provincies kunnen worden aangewezen als afzonderlijke zelfstandige gemeenschappen op den voet van het eerste lid van artikel 67c van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie.
2. De tot zelfstandige gemenschappen aangewezen steden worden stadsgemeenten genoemd.
3. De ordonnantie, waarbij een stadsgemeente als zelfstandige gemeenschap wordt aangewezen wordt "instellingsor-donnantie" genoemd.

Sumber : GB. Tzg. ag. 15421/1925

Abstraksi :

4.15 Peraturan tentang Dewan Kotapraja (Memori penjelasan)

Memori penjelasan mengenai peraturan kotapraja memuat antara lain :

- Pemerintahan kotapraja
- Walikota dan ahli hukum
- Kota-kota yang terletak di dalam propinsi dapat dianggap sebagai kotapraja yang berdiri sendiri
- Keuangan
- Rapat-rapat walikota dan ahli hukum
- Tugas-tugas walikota dan ahli hukum
- Pengawasan kotapraja
- Pertanggungjawaban keuangan

4.16. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang peraturan yang berlaku untuk Kotapraja Batavia, 1905

REGLEMENT van Orde voor de vergaderingen van den Gemeenteraad van Batavia

Art1.

De vergaderingen vangen in den regel aan des morgens te 7 ure.

Art2.

De in art. 32 der Locale raden-ordonnantie (Staatsblad 1905 No. 181) bedoelde oproepingsbriefjes worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, minstens tweemaal

vier en twintig uren voor de vergadering, bij expeditieboek verzonden.

Art. 3.

Ieder lid, dat ter vergadering komt, stelt zijn naam in een daartoe bestemd register en trekt een volgnummer uit eene bus. De leden nemen volgens die nummers zitting. De nummers bepalen tevens de volgorde, waarin zij bij mondelinge stemmingen hun stem uitbrengen. De voorzitter sluit het register af onmiddellijk voordat hij de vergadering open t' leden, die daarna komen, teekenen hun namen onder de afsluiting.

Art. 4.

Na het openen der vergadering leest de secretaris de notulen der vorige vergadering voor.

De notulen bevatten :

- a. Dag en uur der vergadering;
- b. De namen der afwezige leden, met vermelding van de reden van afwezen zoo daarvan kennisgeving is ontvangen;
- c. Eene beknopte opgave van de ter tafel gebrachte stukken, de gedane mededeelingen en voorstellen, enz. en;
- d. De genomen beslissingen.

De notulen worden geschreven in een daartoe bestemd register. De voorzitter onderwerpt ze na de voorlezing aan de goedkeuring der vergadering en ondertee kent de goedgekeurde notulen. De notulen der vergaderingen met gesloten deuren worden in een afzonderlijk register.

geschreven en in de eerstvolgende vergadering, de deuren gesloten, voorgelezen.

Art. 5.

Ieder lid heeft recht te vorderen, dat zijn van dat der meerderheid afwijkend gevoelen in de notulen zal worden vermeld.

Art. 6.

De beraadslagingen over verordeningen, begrotingen en andere in onderdeelen verdeelde regelingen, worden gehouden eerst over de onderwerpen in het algemeen en daarna over de artikelen, posten of andere onderdeelen.

Art. 7.

Geen lid voert het woord, dan na het van den voorzitter verzocht en verkregen te hebben. De voorzitter verleent het woord in de orde waarin het is gevraagd. De leden spreken van hunne plaatsen en mogen in hun rede niet worden gestoord dan krachtens de bepalingen der volgende drie alinea's. Wanneer een spreker zich beleedigende uitdrukkingen veroorlooft of de orde stoort, wordt hij door den voorzitter tot de orde geroepen. Wijkt hij af van het onderwerp in beraadslaging, dan roept de voorzitter hem tot de behandeling van dat onderwerp terug. Gaat een spreker, na herhaaldelijk tot de orde geroepen te zijn, voort met beleedigende uitdrukkingen te bezigen of de orde te storen, of gaat hij, na herhaaldelijk tot te behandeling van het onderwerp teruggeroepen te zijn, voort met van dat onderwerp af te wijken, dan kan hem door den voorzitter het woord ontnemen worden.

Art. 8.

Behalve hij die een in behandeling zijn voorstel heeft ingediend, voert een lid, tenzij met goedkeuring der vergadering, niet meer dan tweemaal over een onderwerp het woord.

Art. 9.

Alvorens een voorstel in stemming wordt gebracht, wordt over eventueele amendementen beslist, over het amendement met de verste strekking, ter beoordeeling van den voorzitter, het eerst.

Art. 10.

Moties worden schriftelijk ingediend. Hebben zij betrekking op het onderwerp in behandeling, dan wordt er dadelijk over beraadslaagd en beslist.

Art. 11.

Bij stemmingen over zaken brengen de leden hun stem uit met het woord "voor" of "tegen", zonder eenige bijvoeging. De leden mogen zich aan stemmingen over zaken niet onttrekken dan krachtens voorschrift eener algemeene verordening.

Art. 12.

Wanneer over het doen van keuzen of voordrachten van personen moet worden gestemd, worden de stembriefjes in eene bus verzameld en wijst de voorzitter twee stemopnemers aan. De voorzitter opent de stembriefjes en leest ze voor; de oudste stemopnemers teekenen de

uitgebrachte stemmen op. Van onwaarde zijn de stembriefjes in blanco; die, welke, ter beoordeeling van den voorzitter, geen persoon duidelijk aanwijzen, alsmede de onderteekende. Wanneer bij de eerste stemming geen volstreckte meerderheid is verkregen, heeft dadelijk een tweede vrije stemming plaats. Is ook daarbij geen volstreckte meerderheid verkregen, dan geschiedt er terstond herstemming tusschen de twee personen, die de meeste en hen die verder een daarmede gelijk getal stemmen op zich verenigd hebben. Ingeval bij herstemming de stemmen staken, worden de namen van hen over wie moet worden geloot, door een der stemopnemers op afzonderlijke briefjes van gelijke grootte geschreven, die, opgerold en in een ringetje geschoven, door hem in de bus worden gedaan en omgeschud. De andere stemopnemer trekt er een uit; hij wiens naam daarop staat, is de gekozene. Nadat de uitslag der stemming geconstateerd is, vernietigen de stemopnemers de briefjes. Elke stemming loopt slecht over een te kiezen of voor te dragen persoon.

Art. 13.

Wanneer een lid naar aanleiding van artikel 18, derde lid, der Locale raden-ordonnantie, inlichtingen van den voorzitter verlangt, dan is daartoe verlof van de vergadering noodig. Dit verleend zijnde, geeft de voorzitter de verlangde inlichtingen of dadelijk of in eene volgende vergadering.

Art. 14.

wanneer de handhaving der orde het noodzakelijk maakt, kan de voorzitter de zitting schorsen gedurende een door hem te bepalen tijd.

Sumber : Bt. 20 Juli 1905 No. 29

Abstraksi :

4.16 Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang peraturan yang berlaku untuk Kotapraja Batavia, 1905.

Ada beberapa peraturan rapat yang harus dipatuhi oleh Kotapraja Batavia, antara lain:

- Rapat-rapat dimulai pukul 7.00
- Tiap-tiap anggota yang datang rapat, harus menuliskan namanya di buku
- Notulen rapat ditulis oleh sekretaris berisi :
 - * Hari dan jam rapat
 - * Nama-nama anggota yang tidak hadir
- Tiap-tiap anggota mempunyai hak menuntut jika terdapat penyimpangan;
- Masing-masing suara anggota hanya memilih atau mendukung seorang saja;
- Jika ada perundingan yang menyimpang maka ketua rapat berhak menarik kembali masalah yang dibicarakan.

4.17. Surat dari RT. Soeradiningrat ditujukan kepada KRA. Danoeredjo Patih Yogyakarta tanggal 19 Moeloed Alip 1835 (24 Mei 1905)

Tedakkan serat dawoeh temballan dalem. Hoewa Raden Adipati Danoeredja Koela kadawahhan timballan dalem. Widjengan dika hangoengdjokhaken serat, hidjemanipoen serat hidjengandika hangoendjoekhaken tedakan serattipoen hingkang rama Kangdjeng Toewan Resident doemateng hidjengandika, hingkang dipoen titimangsani tanggal

kaping 28 Maart 1905 nommer 25/1 bab bade hangawanteni Raad kita.

Wandene sesahossan hoedjoek pangrembag hidjengandika, kedjawi karsa dalem, boten mawi Raad kita. Dene toemindakipoen lampah soepados kawiloedjenganipoen negari dalem, poenapa dene hingkang dados sahenipoen negari dalem sampejan dalem hingkang Sinoehoen kalian Kangdjeng Toewan Resident sabiantoe sinten hingkang dipoen pitadas nindahaken pendamelan Toewan Toewan kanti habdidalem hingkang sampoen dados sabijanten dalem kalian Kangdjeng Toewan Residen hidjengandika nyoemanggakhaken karsa dalem. Poenika tedakkan seratipoen Kangdjeng Toewan Resident wahoe hinggih sampoen kahoeningan trang sadaja.

Bab poenika sesahossan hoendjoek pangrembag hidjengandika wahoe sagnking penggalih dalem hinggih sampoen leres, boten mawi Raad Kita, dene lampah lampahhipoen dipoen tindakhaken kados dene sesahossan hoendjoek wahoe, hinggih sampoen dodas karsa dalem. Poenika hidjengandika ladjeng dipoen kersakhaken matoer doemateng hingkang rama Kandjeng Toewan Resident, hangatoerna kadas dene sesahossan hoendjoek pangrembag hidjengandika ngadjeng wahoe kados hadattipoen hingkang sampoen kelampahan, sampoen ngantos kakirangan, timballan dalem kapitadjengngaken hidjengandika.

Rebo kaping 19 Moelood Alip 1835

Joedanegara

Sampoen tjotjok kalyan babonnipoen

Raden Toemenggoeng

Soeradiningrat.

Sumber : Bt. 13 September 1905 No. 21

Abstraksi :

4.17 Surat dari RT. Soeradiningrat ditujukan kepada KRA. Danoredjo Patih Yogyakarta, 19 Moelod Alip 1835 (24 Mei 1905).

RT. Soeradiningrat menulis surat kepada KRA. Danoredjo yang memberitahukan bahwa akan dibangun ibukota di daerah kotapraja. Lebih baik memelihara kerajaan Yogyakarta daripada membangun sebuah kota lagi dan tidak begitu diperlukan sekali untuk membangun ibukota baru.

BAB V

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DEWAN (KIESRECHT)

5.1. Surat Keputusan Kerajaan Belanda 1923 untuk memperbaiki Surat Keputusan tentang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda

HEBBERN GODGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Het Decentralisatie-besluit, laatstelijk gewijzigd bij artikel I van het Koninklijk besluit van 12 Maart 1923 (Indisch Staatsblad 1923 No. 249) ondergaat de volgens veranderingen: Artikel 1 lid 1, zooals dit luidt krachtens het Koninklijk Besluit van 26 Juli 1918 (Indisch Staatsblad 1918 No. 592) wordt gelezen:

De raden zijn samengesteld uit:

- 1e. Onderdanen, Nederlanders;
- 2e. Onderdanen, niet-Nederlanders van inheemschen oorsprong;
- 3e. Onderdanen, niet-Nederlander van vreemden oorsprong.

Artikel 3 lid 4,

zooals dit luidt krachtens het Koninklijk Besluit van 17 Maart 1916 (Indisch Staatsblad 1916 No. 506) wordt gelezen:

De voorzitter van den gemeenteraad, die door den Gouverneur-Generaal is benoemd, kan ook door Hem worden geschorst en ontslagen. Hij voert den titel van burgermeester. Artikel 4 lid 1, zooals dit luidt krachtens artikel I van ons besluit van 6 November 1916 (Indisch Staatsblad 1917 No. 43) wordt gelezen:

Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel, worden de leden der raden benoemd door den Gouverneur-Generaal en waar het betreft een gemeente, gelegen binnen een provincie door den Gouverneur, of wijst de Gouverneur-Generaal de ambten aan, waaraan het lidmaatschap van den raad is verbonden. Deze bepaling geldt ook voor den secretaris, zoo hij landsdienaar is.

Artikel 5,

zooals dit luidt krachtens artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 6 November 1916 (Indisch Staatsblad 1917 No. 43) wordt gelezen:

Bij de regeling van de vereischten voor de bevoegdheid tot de verkiezing van raadsleden wordt in acht genomen, dat personen, om voor kiesbevoegdheid in aanmerking te komen, Nederlandsch onderdaan moeten zijn.

Sumber: G.B. Tzg.Ag. 986/1926.

Abstraksi :

5.1 Surat Keputusan Kerajaan Belanda 1923 untuk memperbaiki Surat Keputusan tentang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda

Perubahan **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** sbb:

- A. Anggota Dewan terdiri dari :
- Orang Belanda
 - Orang bukan Belanda, penduduk asli
 - Orang bukan Belanda, orang asing
- B. Ketua anggota Dewan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, dapat diskors dan dipecat oleh Gubernur Jenderal. Ia bergelar walikota
- C. Mengenai suatu kotapraja yang terletak di dalam propinsi anggota dewan ditunjuk dan diangkat oleh gubernur, kecuali untuk sekretaris.
- D. Pemilihan anggota harus orang Belanda

5.2. *Peraturan tentang Locale Raden pada Kotapraja tanggal 1 Juli 1925.*

Heeft goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan het eerste lid van artikel 7 der Locale raden-ordonnantie, zooals dit artikel wordt gelezen ingevolge de ordonnantie van 18 Maart 1908 en 28 Januari 1910 (Staatsblad Nos. 262 en 82), worden toegevoegd de woorden: behoudens de bevoegdheid van den burgemeester, die secretaris der gemeente is, om tevens lid van den raad te zijn .

Tusschen de artikelen 25a en 25b der Locale raden-ordonnantie wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25a bis. De Burgemeester kan, met

goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, door den raad tot secretaris worden benoemd.

Hij wordt door den raad als zoodanig niet geschorst of ontslagen, dan met goedkeuring van den Gouverneur-Generaal .

Artikel 2

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging en werkt terug tot 1 Juli 1925.

Sumber: G.B.Tzg.Ag. 986/1926.

Abstraksi :

5.2 Peraturan tentang Locale Raden pada Kotapraja tanggal 1 Juli 1925

Memperhatikan artikel 20,29.31,33 dan 68c dari peraturan tentang kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda, dimengerti:

Artikel 1

- A. Ayat pertama artikel 7 Peraturan Locale-Raden, seperti pada Peraturan 18 Maret 1908 dan 28 Januari 1910 disebutkan: Dengan tidak mengurangi wewenang walikota, sekretaris kotapraja sekaligus adalah anggota dewan.
- B. Antara pasal 25 a dan 25 b Peraturan anggota dewan setempat adalah sbb:

Pasal 25a walikota dengan pengawasan Gubernur Jenderal dapat diangkat menjadi Dewan Sekretaris.

5.3. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Locale Raden tanggal 25 Desember 1925 No. 10.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Te Bepalen dat de Koninklijke Besluiten van 31 October 1925 Nos. 58 en 59 zullen worden afgekondigd door plaatsing in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie.

Sumber: Bt. 25 Desember 1925 No. 10; Tzg.Ag. 986/1926.

Abstraksi :

5.3 Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Locale Raden tanggal 25 Desember 1925 No. 10

Surat Keputusan tanggal 25 Desember 1925 No.10 isinya:

- Ditetapkan bahwa Surat Keputusan Kerajaan tanggal 31 Oktober 1925 No.58 dan No.59 akan diumumkan dalam Lembaran Negara Pemerintahan Hindia Belanda.
- Ditetapkan bahwa Surat Keputusan Kerajaan tanggal 31 Oktober 1925 No.58 (Lembaran Negara No.662) mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1925.

5.4. Surat Keputusan Ratu Juliana tentang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1925 No. 62 .

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN

Artikel 1.

Artikel 18 van het Decentralisatie-besluit, zooals dit artikel luidt ingevolge ons besluit van 6 Januari 1911 No. 36 (Indisch Staatsblad No. 236), wordt nader gelezen als volgt;

Voor elk gewest of gedeelte van een gewest, waar voor een raad is ingesteld, wordt de eerste begrooting van ontvangsten en uitgaven bij ordonnantie vastgesteld.

Vervolgens wordt de begrooting jaarlijks vastgesteld door den raad. Zij behoeft als dan om te werken: indien zij is vastgesteld door een raad, waarvan de voorzitter tevens hoofd van gewestelijk bestuur is, de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal;

Sumber: G.B. Tzg. Ag. 986/1926.

Abstraksi :

5.4 Surat Keputusan Ratu Juliana tentang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1925 No. 62.

Pada Pasal 18 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** dibaca sebagai berikut :

Tiap-tiap daerah atau bagian dari daerah yang dipimpin oleh seorang dewan, anggaran penerimaan dan

pengeluarannya ditentukan oleh peraturan. Anggaran tahunan selanjutnya ditetapkan oleh dewan. Mereka diawasi oleh Gubernur Jenderal baik sebagai ketua dewan maupun kepala pemerintahan setempat Surat Keputusan ini ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

5.5. Surat Keputusan Ratu Wilhelmina tentang Desentralisasi tanggal 26 Juli 1918.

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1 van het Decentralisatie Besluit (Indisch Staatsblad 1905, No 137), zooals dat besluit sedert is gewijzigd, wordt gezelen als volgt;

De raden zijn samengesteld uit Europeanen of met hen gelijkgestelde personen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen. Waar eën deze bevolkingsgroepen niet in voldoende aantal aanwezig is, kan van het voorschrift van het eerste lid van dit besluit worden afgeweken.

By ordonnantie wordt bepaald :

- a. Welke bevolkingsgroepen in elken raad vertegenwoordigd zullen zijn en het aantal van die vertegenwoordigers;
- b. Het aantal leden van elken raad; het is oneven.

Onze Minister van Kolonien is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Sumber : Ag. 3/453; Tzg. Agenda 15421/1925.

Abstraksi :

5.5 Surat Keputusan Ratu Juliana tentang Desentralisasi tanggal 26 Juli 1918

Artikel 1 Surat Keputusan tentang Desentralisasi telah dituangkan dalam **Staatsblad van Nederlandsch-Indie** tahun 1905 No. 137 dan telah diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pembentukan anggota terdiri dari orang-orang Eropa, dan mereka yang telah dipersamakan kewarganegaraannya, Pribumi dan Timur Asing. Jika kelompok masyarakat ini tidak cukup jumlahnya, akan dibuat aturan lagi, yaitu:

- a. Kelompok masyarakat mana dapat membawahi masing-masing anggota dan jumlah wakil-wakil tersebut.
- b. Jumlah anggota dewan, harus ganjil.

5.6. Surat dari R.M.H. Woerjaningrat (w.g. voorzitter) dan R. Soetopo Hadisepoetro (w.g. 2e secretaris) pimpinan perserikatan Budi Utomo di Yogya kepada Gubernur Jenderal, tanggal 9 Nopember 1923.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen R.M.H. Woerjaningrat en R. Soetopo Hadisepoetro, respectievelijk Voorzitter en 2e Secretaris van't Hoofdbestuur der te Djokjakarta gevestigde, bij Gouvernements Besluit van 28 December 1909 No. 52 als rechtspersoon erkende vereeniging "BOEDI-OETOMO" in deze handelende voor en namens gemelde vereeniging; dat zij zich wenschen te kwijten van de hun door de te Soerakarta gehouden openbare vergadering verstrekte opdracht om daar die vergadering

genomen motie onder de aandacht van de Regeering van Nederlandsch Indie te brengen.

Weshalve adressanten zich de vrijheid veroorloven Uwer Excellentie hiernevens de motie eerbiedig aan te bieden.

Sumber : Ag. 2877 /1923; BGS. 6 Juni 1922 No. 1579; GB. Tzg. Ag. 15421/ 1925.

Abstraksi :

5.6 Surat dari R.M.H. Woerjaningrat (w.g. voorzitter) dan R. Soetopo Hadisepoetro (w.g. 2e secretaris) pimpinan perserikatan Budi Utomo di Yogya kepada Gubernur Jenderal, tanggal 9 Nopember 1923.

Bersama ini dihaturkan pemberitahuan bahwa R.M.H. Woerjaningrat dan R. Soetopo Hadisepoetro yang masing-masing sebagai pimpinan dan sekretaris kedua dari perkumpulan Boedi Oetomo yang mana perkumpulan itu telah disahkan sebagai badan hukum berdasar Surat Keputusan Pemerintah 28 Desember 1909 No. 52. Bahwa berdasar keputusan rapat terbuka di Solo, bersama ini dihaturkan suatu mosi ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda.

5.7. Saran dari Penasehat untuk Dentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal, tanggal 26 Nopember 1920 No. 1514/K

Bij den Volksraad aanhanging gemaakt het bij wet ontwerp tot herziening van het bestuursstelsel zich op het

standpunt heeft gesteld dat bij de samenstelling van en het kiesrecht voor de in te stellen provinciale raden geen onderscheid naar ras of landaard behoort te worden gemaakt. ook voor de gemeenteraden zoowel ten aanzien van samenstelling als kiesrecht het onderscheid naar ras kenmerk zal dienen te vertallen.

Artikel 1 van het Decentralisatie Besluit en het kiesrecht voor de gemeenteraden houden inderdaad nauw verband. Waar ik mij bij het doen van de voorstellen vervat in mijn brief van 1 Maart heb moeten stellen op het standpunt aangegeven in artikel 1 van het Decentralisatie Besluit, hetwelk vaststelling van het aantal raadsleden van iedere bevolkingsgroep bij instellingordonnantie voorschrijft, was de aanwijzing dier leden volgens een zeer vrijgevig kiesrecht binnen iedere groep naar mijn inzien geoorloofd. Wordt daarentegen de wettelijk beperkte samenstelling door een geheel vrije vervangen, dan zal hiervan een zeer belangrijk ingeperkt kiesrecht het onvermoedelijk gevolg moeten zijn.

Zoowel bij het wets voorstel voor de regentschapsraden als bij dat voor de provinciale raden, voor welke beide de samenstelling zonder indeeling naar bevolkingsgroep is gedacht, heeft de regeering dit punt onder de oogen moeten zien.

Regentschapsraden en provinciale raden zullen nieuwe instellingen zijn; nieuw ook in zinn dat van bepaalden aandrang der bevolking tot instelling van deze staatkundige lichamen niet kan worden gesproken; en de politieke organisatie der bevolking van de staatkundige instelling eerst het gevolg zal zijn. De Regeering mag zich op dit terrein dus in zooverre vrij gevoelen, dat de ingezetenen der te

creeeren ressorten iedere organisatie met dezelfde gelijkmoedigheid zullen aanvaarden.

In de gemeenten, en vooral in de grootere staat de zaak evenwel geheel anders. Aanvankelijk geheel uit benoemde leden bestaande en met een ambtelijke meerderheid, heeft de aandrang van de ingezetenen uitgegaan eerst het verplicht ambtelijk element doen vervallen en vervolgens van lieverleden algeheel aanwijzing door volkkeuze doen verwerven. verruiming van het kiesrecht is de laatste drie jaren uitsluitend de leuze geweest.

Sumber : Ag. 3415/ 20; Bt. 22 Maret 1921 No. 26; GB. Tzg. ag. 15421/ 1925.

Abstraksi :

5.7 Sarana dari Penasehat untuk Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 26 Nopember 1920 No. 1514/K

Sehubungan dengan telah disetujuinya perbaikan sistem pemerintahan dan pemilihan dewan yang tidak lagi berdasarkan ras, maka terdapat pula perbedaan yang harus dipikirkan antara daerah kabupaten dan propinsi yang merupakan daerah baru. Di sini tidak dapat dibicarakan begitu juga organisasi politik masyarakat dari daerah tersebut. Pemerintah dari daerah ini merasa bebas karena penduduk dapat menerima masing-masing organisasi dengan kemudahan yang sama. Di kotapraja, terutama di daerah/kota besar semuanya dapat dikatakan berbeda. Pada mulanya anggota yang diangkat mempunyai kewajiban pada penduduk dan mempunyai peran yang sangat penting.

5.8. Surat dari Walikota Medan kepada Gubernur Jenderal tanggal 16 Maret 1925 No. 414

"Landvoogd Buitenzorg ref stbld 1925 No. 91 deze vermoeden in art acht B lid drie kiesordonnantie tusschen de woorden laatstverloopen en dienstjaar inbreken de woorden of het daaraan voorafgaande punt huidige tekst genoemd lid drie in strijd met gewijzigd art twee lid een sub c punt inverband vaststelling kiezerslijst verzoeke beleefd bericht van instemming lezing lid drie overeenkomstig sub c Burgemeester"

De aanleiding tot het zenden van mijn telegram wordt gevonden in de opvolging van het voorschrift gegeven in lid 3 van artikel 8 b der kiesordonnantie.

Heeft zich in den loop van het kalenderjaar 1924 te Medan gevestigd. In de plaats van herkomst was hij over 1924

- a. Aangeslagen in eene landsinkomstenbelasting doch heeft zijn aanslag niet voldaan.
- b. Nog niet aangeslagen in eene landsinkomstenbelasting doch wel over 1923, welke aanslag voldaan is.

Sumber : GB. Tzg. Ag 15421/1925; (Kiesordonnantie gemeente raden te Medan).

Abstraksi :

5.8 Surat dari Walikota Medan kepada Gubernur Jenderal tanggal 16 Maret 1925 No. 414

Walikota **Buitenzorg** mengacu pada **Staatsblad** 1925 No. 91 dalam artikel 8 lid. 3 Peraturan Pemilihan memohon

penjelasan mengenai lid. 3 seperti yang telah dibicarakan dengan para walikota.

Di situ dijelaskan adanya kata-kata perkembangan terakhir atau perkembangan selanjutnya tahun ini.

Tuntutan untuk wewenang pemilihan dilonggarkan dalam artikel 8 lid. 3 Peraturan Pemilihan. Kata-kata seperti tersebut di atas diartikan untuk mendapatkan hak pemilihan aktif dan ini ternyata erat berhubungan dengan penetapan pajak penghasilan.

5.9. Saran dari Dewan Hindia kepada Gubernur Jenderal, menanggapi saran Komisi Desentralisasi tanggal 25 Maret 1924 No. 6534

ADVIES VAN DEN RAAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE

Gébracht in de vergadering van 9 Mei 1924 (verzonden 10 Mei)

1. Blijkens zijn advies van 15 Juni 1923 No. IV kon de Raad zich toenmaals geheel vereenigen met de voorstellen van den Adviseur voor de decentralisatie tot wijziging van het kiesrecht voor de gemeenteraden. Deze voorstellen hadden de strekking om de met afschaffing van den census het kiesrecht toe te kennen aan hen die in eenige belasting zijn aangeslagen en zich persoonlijk schriftelijk voor plaatsing op de kiezerslijst aanmelden; 2e. aan de vrouw het kiesrecht te verleen; 3e. het kiezerscorps groepsgewyze aan de verkiezing te doen deelnemen in dien zin dat elke kiezer alleen kiest de raadsleden tot welke group hij behoort.

2. In verband met de sedert aanvaarde nieuwe staats rechtelijke groepbering der bevolking meende het College evenwel dat tegelijkertijd deze nieuwe groepbering in de plaats zou moeten treden voor die naar het raskenmerk, weshalve het in overweging gaf den Adviseur voor de decentralisatie uit te noodigen om in dezen zin een ontwerp tot wijziging van artikel 1 van het Decentralisatie-Besluit aan zijne voorstellen toe te voegen, om vervolgens het overleg met den Minister van Kolonien te openen, waarbij deze zich dan tevens zou kunnen uitspreken over de invoering van het actief kiesrecht voor de vrouw.

Sumber : Kl. 25 Maret 1924 No. 6534; Bgs. 26 Juni 1923 No.1515/II; GB. Tzg. Ag 15421/1925.

Abstraksi :

5.9 Saran dari Dewan Hindia kepada Gubernur Jenderal, menanggapi Saran Komisi Desentralisasi tanggal 25 Maret 1924 No. 6534

Sesuai dengan saran tanggal 15 Juni 1923 No. IV dewan dapat menyimpulkan semuanya atas nasehat desentralisasi mengenai peraturan pemilihan Dewan Kotapraja. Usul ini diutamakan untuk :

- Penetapan pajak
- Memberikan hak pilih kepada wanita
- Kelompok memilih anggota dewannya masing-masing

Untuk semua itulah diusahakan adanya perundingan dengan menteri kolonial yang akan membicarakan mengenai kesempatan hak pilih bagi wanita secara aktif sesuai dengan peraturan artikel 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi**

5.10. Surat dari Komisi Penasihat Desentralisasi kepada Gubernur Jenderal tanggal 27 Pebruari 1924 No. 257/Z/ K/DI (Bijlagen : 3)

In verband daarmee eene wijziging van artikel 1 van het Decentralisatie-Besluit te ontwerpen, aansluitende bij het kiesrechtschema voor den Volksraad.

In voldoening aan deze opdracht worden hier bij aangeboden :

1. Een ontwerp-Koninklijk Besluit tot wijziging van het Decentralisatie-Besluit;
2. Een ontwerp-ordonnantie tot wijziging van de instellings ordonnanties der lokale raden;
3. Een ontwerp-ordonnantie tot wijziging der kiesordonnantie.

Aangezien door deze ontwerpen aan de opdracht der Regeering wordt voldaan, schijnt een uitvoerige motiveering of toelichting daarvan overbodig.

De nieuwe redactie van artikel 1 van het Decentralisatie-Besluit, zoomede de ten aanzien der instellingsordonnanties voorgestelde wijziging heeft ten doel om ook bij de samenstelling der gemeenteraden de bestaande groepindeeling : Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, te vervangen door eene onderscheiding tusschen Nederlanders en andere Nederlandsche onderdanen, welke onderscheiding voor den Volksraad en de provinciale en regentschapsraden aanvaard is.

Sumber : Ag. 6534/1924; Bgs. 5 Juni 1924 No. 1315 b/II; GB. Tzg. Ag. 15421/1925.

Abstraksi :

5.10 Surat dari Komisi Penasehat Desentralisasi Kepada Gubernur Jenderal tanggal 27 Pebruari 1924 No. 257/Z/ K/DI

Penasehat desentralisasi menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang isinya mengenai:

- Rencana perubahan **Surat Keputusan tentang Desentrali-sasi** ;
- Rencana perubahan peraturan dewan setempat;
- Rencana perubahan peraturan pemilihan.

Redaksi baru artikel 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** dimaksudkan juga untuk pembagian kelompok yang ada: Eropa, Pribumi dan Timur Asing. Artikel 5 Desentralisasi Besluit mengenai hak pilih pasif.

Para wanita juga mempunyai hak pilih aktif dalam Dewan Kotapraja.

5.11. Nota dari Algemeene Secretarie 1921 tentang ketentuan bagi yang telah dipersamakan warga negaranya untuk duduk sebagai anggota dewan kotapraja

In 1921 had er een correspondentie plaats tusschen Adviseur Chineesche Zaken en Adv. Decentralisatie over de vertegenwoordiging van de Chineesche bevolking groep in de gemeenteraden. De adviseur Bruineman wees er daarbij op, dat z.i. een van de grootste moeilijkheden voor het vinden van geschikte Chineesche candidateen voor de gemeenteraden gelegen was in de beperkte keus: de met Europeanen gelijkgestelden nl. zouden voor de vervulling

van Chineesche zetel niet in aanmerking kunnen komen. Daartegen merkt de Adviseur voor Chineesche Zaken op, dat de gelijkstelling de individuen aan een beter aan hun rechtsbehoeften beantwoorden recht onderwerpt, maar hen in den bevolkingsgroep waar zij uit voortkomen.

De heer Bruineman zou een ruimer standpunt willen aanbevelen uit de politieke overweging, dat er onder de peranakans een groep valt te bespeuren welke de volgen van het Nederlandsch onderdaanschap wil erkennen en welke daarom ook zou willen medewerken in vertegenwoordigend lichamen zooals de gemeenteraden.

Sumber : Ag. 10453/21; Ag. 31457/22; Bgs. 14 April 1925 No. 944/II; GB. Tzg. Ag 15421/1925.

Abstraksi :

5.11 Nota dari Algemeene Secretarie 1921 tentang ketentuan bagi yang telah dipersamakan warga negaranya untuk duduk sebagai anggota Dewan Kotapraja

Pada tahun 1921 telah diadakan surat menyurat antara Penasehat Urusan Cina dengan Penasehat Desentralisasi mengenai wakil kelompok penduduk Cina di Dewan Kotapraja. Penasehat Bruineman mengetahui bahwa sulit untuk menemukan calon orang-orang Cina yang pantas duduk di kotapraja, karena perbedaan diantara bangsa Eropa dengan orang-orang Cina. Oleh karena itulah, Penasehat Urusan Cina mengajukan pendapat mengenai persamaan kedudukan dan kebutuhan hak di dalam lingkungan sosial maupun kelompok penduduk. Jongeneel mengatakan bahwa akan disusun peraturan tentang wakil-wakil yang harus duduk sebagai anggota dewan yang terdiri dari orang Eropa, Pribumi dan Timur Asing. Mereka akan

mewakili kelompoknya masing-masing dan duduk sebagai wakil kotapraja.

5.12. Surat dari Penasihat Kepala Dinas Urusan Warga Negara Cina kepada Gubernur Jenderal tanggal 8 Maret 1921 No. 130/21

In artikel 1 tegen de dezerzijds epleite koerswijziging verzet als wel de heerschende opvatting daaromtrent. Het schijnt derhalve niet a priori uitgesloten, dat ook zonder eene wetswijziging - op welke inopportunititeit Mr. Kinderman den nadruk legt - het onderwerpelijk artikel zoodanig uitgelegd zou kunnen worden, dat alsnog de toegang tot de locale raden den gelijkgestelden Chineezen als er tegenwoordigers der "Vreemde Oosterlingen" wordt geopend.

In artikel 1 alinea 3a wordt wel geëischt, dat bij "ordonnantie wordt bepaal, welke bevolkingsgroepen in elken raad vertegenwoordigd zullen zijn en het aantal van die vertegenwoordigers", doch een imperatief voorschriefft, dat de vertegenwoordiger ook formeel tot de door hem vertegenwoordigde groep moet behooren, ontbreekt.

Sumber : Bgs. 14 April 1925 No. 944/II; GB. Tzg. Ag 15421/1925.

Abstraksi :

5.12 Surat dari Penasehat Kepala Dinas Urusan Warga Negara Cina kepada Gubernur Jenderal tanggal 8 Maret 1921 No. 130/21

Surat Penasehat Desentralisasi alinea 3 tidak seperti

Surat Keputusan tentang Desentralisasi, di mana artikel 1 membela tujuan peraturan, ternyata tidak semata-mata apriori, tapi juga tanpa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Kindermann menggarisbawahi masalah tersebut bahwa masyarakat Cina juga terbuka kesempatannya sebagai wakil dari Timur Asing untuk duduk dalam Dewan Lokal.

Dalam artikel 1 alinea 3a sudah digugat, bahwa pada peraturan ditentukan di mana kelompok masyarakat dapat mewakili masing-masing anggota dan jumlah wakil itu.

5.13. Surat dari Komisi Penasehat Desentralisasi kepada Penasihat Kepala Dinas Urusan Warga Negara Cina tanggal 17 Agustus 1922 No. 1183/DI

De bevolking van Nederlandsch-Indie is ingedeeld in Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen. Meer dan deze drie bevolkingsgroepen zijn wettelijk niet bekend en van "met Europeanen gelijkgestelden" behoort in de wetgeving niet meer gesproken te werden. Staatsrechtelijk zijn zij Europeanen (vgl. artikel 3 van Staatsblad 1907 No. 205 juncto Staatsblad 1919 No. 816)

Zou artikel 1 lid 1 van het Decentralisatie-Besluit thans opnieuw geregeerd worden dan zouden de woorden "of met hen gelijkgestelde personen" daaruit zijn te schrappen. Zij behooren thans als vervallen te worden aangemerkt.

Ingevolge dit voorschrift pleegt in de instellings ordonnanties de samenstelling der raden geregeld te werden en wel, om een recent voorbeeld te nemen (gemeenteraad van Amboina artikel 6 van Staatsblad 1921 No. 524) op deze wijze: "Het aantal leden van dien raad is 11. Hij is samengesteld uit 7 Europeanen, 2 Inlanders en 2 Vreemde Oosterlingen".

Het springt in het oog dat het voorschrift van lid 3 van artikel 1 van het Decentralisatie-Besluit hierbij niet strikt opgevolgd is, want er wordt niet gezegd welke bevolkingsgroepen in den raad vertegenwoordigd zullen zijn, doch er wordt slechts bepaald dat de raad samengesteld is uit een zeker aantal personen uit elke bevolkingsgroep.

Sumber : Bgs. 14 April 1925 No. 944/II; GB. Tzg.Ag 15421/1925).

Abstraksi :

5.13 Surat dari komisi Penasehat Desentralisasi kepada Penasehat Kepala Dinas Urusan Warga negara Cina tanggal 17 Agustus 1912 No. 1183/DI

Masyarakat Hindia Belanda terdiri dari bangsa Eropa, Pribumi dan Timur Asing. Selain ketiga kelompok masyarakat ini, tidak tercantum dalam undang-undang, dan "masyarakat Eropa yang disamakan" tidak lagi dibicarakan dalam Peraturan Undang-Undang. Secara hukum negara mereka adalah orang-orang Eropa.

Karena itulah artikel 1 lid 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** diperbaharui dan kalimat "mereka yang disamakan" dihapuskan.

Jumlah dewan adalah 11, terdiri dari 7 Eropa, 2 Pribumi dan 2 Timur Asing.

Terlihat bahwa lid 1 artikel 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** ini sedikit fleksibel untuk bangsa Timur Asing yang dapat mewakili kelompok masyarakatnya untuk duduk sebagai wakil dewan seperti halnya masyarakat Eropa.

5.14. Surat dari Penasihat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 12 Maret 1920 No. 310/K (bijlagen : 15)

Voor eerst kan gewezen worden op de motie, aangenomen in een door de kiesvereniging Melajoe uitgeschreven openbare vergadering, gehouden op 17 Februari 1918 in het Decapark te Batavia, waarop een tiental meerendeels Inlandsche verenigingen vertegenwoordigd waren, welke motie zich uitsprak voor het doen vervallen van de voor het actief kiesrecht voor de gemeenteraden gestelde eischen van maatschapelijken welstand en van kennis van de Nederlandsche taal en deze beperkt wilde zien tot het stellen allen van redelijke ontwikkelingseischen.

De gemeenteraden van Semarang gaf in zijne op 15 Mei 1918 gehouden vergadering voorts als zijn oordeel te kennen dat het actief kiesrecht voor de gemeenteraden behoort te worden toegekend aan allen zonder onderscheid van ras of sexe, die kunnen lezen en schrijven de Nederlandsche of Maleische taal of eene der in het ressort van den betrokken raad gesproken en geschreven inheemsche talen, en wenschte herziening van de kiesordonnantie in dezen zin.

Zal in de hier volgende beschouwingen dus rekening worden gehouden ook met de regentschappen en andere bestaande of denkbare landelyke gemeenten, in myne voorstellen zal ik mij ten slotte tot het kiesrecht voor de gemeenteraden bepalen.

I. Karakter der locale raden.

Voor de gemeenten Batavia, Meester Cornelis en Buitenzorg kan dit jaar, voor Soerabaja, Semarang, Bandoeng en vele kleinere gemeenten kan in 1921 op een vijftienjarige periode van groei en ontwikkeling worden gewezen.

II. Samenstelling der locale raden.

“Maatregelen waardoor aan het Inlandsche element een grooter plaats in de gemeenteraden wordt ingeruimd dan dit inneemt sinds de bij de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 587 in hare samenstelling gebrachte wijziging, zijn van de Regeering niet te verwachten. Men verlieze niet uit het oog dat de belangrijker gemeenten bij haar instelling te beschouwen waren als Westersche enclaves in het Oosten. Deze toestand wijzigt zich slechts zeer geleidelijk en eerst naar gelang voor het begrip enclave geen ruimte meer is, zal het fundamenteel beginsel waarop de samenstelling dier raden berust herziening behoeven”.

III. Aanwijzing van de leden der locale raden.

- a. Benoeming.
- b. Bevoorrechtiging van bepaalde groepen van kiezers.
- c. Wettelijke verdeeling raadszetels naar raskenmerk.

Sumber : Bgs. 19 Maret 1920 No. 484/II; GB. Tzg. Ag 15421/1925).

Abstraksi :

5.14 Surat dari Penasehat Desentralisasi ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 12 Maret 1920 No. 310/K (bijlage : 15)

Tanggal 17 Februari 1918, 10 perkumpulan bangsa Melayu mengadakan rapat di Decapark Batavia, membicarakan tentang mosi hak pilih aktif Dewan

Kotapraja. Rapat selanjutnya diadakan pada tanggal 15 Mei 1918 di Semarang, dengan topik yang sama. Ada beberapa usul yang harus diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu:

1). Karakter Dewan Lokal

Perkembangan dan pertumbuhan kota Batavia, **Meester Cornelis** dan Bogor akan mulai pada tahun ini, sedangkan untuk Surabaya, Semarang, Bandung dan kotapraja kecil lainnya pada tahun 1921. Pada awalnya semua dipimpin oleh anggota yang diangkat. Tahun 1917 hak pilih diperluas pada semua kelompok masyarakat dan dipilih menjadi semua anggota dewan.

2). Susunan Dewan Lokal

Terdiri dari kelompok masyarakat, masyarakat Eropa, Cina, Pribumi.

3). Syarat-syarat anggota dewan lokal:

- a. Diangkat
- b. Mempunyai hak istimewa dari kelompok masyarakat tertentu
- c. Ras keturunan menurut undang-undang.

5.15. Saran dari Penasehat Desentralisasi kepada Gubernur Jenderal, tanggal 4 Pebruari 1925, No. 189/K/DI.

Bij den brief van den 1sten Gouvernements Secretaris van 2 September 1924 no.1958/II werd mij opgedragen van mijn gevoelen te doen blijken nopens de vraag of het geen aanbeveling zou verdienen de aanhanging voorstellen tot wijziging van het gemeente-kiesrecht los te maken van

de regeling van de positie der gemeenten in provinciaal verband en de invoering van het nationaliteitscriterium bij de samenstelling der vertegenwoordigende lichamen, waaraan zij gekoppeld zijn geraakt en afzonderlijk verder in behandeling te nemen.

De oorspronkelijke voorstellen werden door den toenmaligen Adviseur voor de Decentralisatie in voldoening aan de hem in 1918 verstrekte regeeringsopdracht ingediend bij brief van 12 Maart 1920 no. 310/K.O.M. werd hierbij voorgesteld splitsing van het kiezerscorps voor de gemeenteraden in naar het ras onderscheiden groepen in aansluiting aan de door artikel 1 van het Decentralisatie-Besluit geëischte onderscheiding naar het ras bij de samenstelling dezer raden. Waar echter juist voor de in te stellen provinciale en regentschapsraden het beginsel was aanvaard om zoowel bij de samenstelling van deze lichamen als bij de organisatie van het kiezerscorps het raskenmerk te laten vervallen, deed de vraag zich voor of dit beginsel nu ook niet ten aanzien van de gemeenteraden diende gevolgd te worden, welke vraag bij den Indischen brief van 22 Maret 1921 No. 340/26 aan het Opperbestuur ter beslissing werd voorgelegd. Het schrijven van den Minister van 13 Augustus d.a.v. No. 2/1850 bracht als antwoord, dat de onderscheiding naar de bevolkingsgroepen in artikel 1 van het Decentralisatie-Besluit moest behouden blijven.

De herzienings voorstellen werden nu door mijn ambtsvoorganger opnieuw aan de orde gesteld (brief 27 October 1921 No. 1504/K/Z). In voldoening hieraan werden door Mr. Jongeneel bij brief van 27 Februari 1924 No. 257/Z/K/DI de volgende ontwerpen aangeboden;

- I. Een ontwerp-Koninklijk Besluit tot wijziging van het Decentralisatie-Besluit.

- II. Eenontwerp-ordonnantietotwijzigingvande instellingsordonnanties der locale raden
- III. Een ontwerp-ordonnantie tot wijziging der Kiesordonnantie.

Sumber : Bt. 26 Pebruari 1925 No.1; GB. (Tzg.Ag. 15421/1925).

Abstraksi :

5.15 Saran dari Penasehat Desentralisasi kepada Gubernur Jenderal tanggal 4 Pebruari 1925 No. 189/K/DI

Surat Sekretaris Negara 2 September 1924 No. 1958/II menanyakan perihal peraturan pemilihan anggota kotapraja dan penerapan kriteria kebangsaan yang disusun oleh badan perwakilan. Kemudian akan diadakan rapat membahas perbaikan pemilihan anggota Dewan Kotapraja. Usul tersebut diajukan oleh Dewan Penasehat Desentralisasi yang sekarang dengan suratnya tanggal 12 Maret 1920 No. 310/K maksudnya agar disusun pembagian kelompok pemilih untuk Dewan Kotapraja sesuai dengan kelasnya (ras), seperti ditetapkan dalam artikel 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** . Usul perbaikan ini diperbarui pada peraturan sesuai surat 27 Oktober 1921 No. 1504/K/II. Jongeneel dalam suratnya tanggal 27 Pebruari 1924 No. 257/II/K/DI, menulis:

- I. Rencana Surat Keputusan Raja tentang peraturan **Surat Keputusan tentang Desentralisasi**
- II. Rencana peraturan tentang Dewan Lokal
- III. Rencana peraturan tentang pemilihan Dewan Kotapraja

5.16. Surat pengantar dari Ajun Penasihat Desentralisasi, mengenai surat Walikota Kotapraja Medan tanggal 8 Mei 1925 No.6147/D

Vorenstaand schrijven van den burgermeester van Medan vermag geen wijziging te brengen in mijne in mijn brief van 18 Maart jl. No. Dec. 11/1/6 bekendgestelde en blijkens het Regeeringstelegram aan den burgemeester van 23 Maart d.a.v. No. 275/II door Uwe Excellentie gedeelde meening, dat de jongste wijziging van artikel 2 lid 1 sub c der kiesordonnantie eene aanvulling, als door den heer Mackay bedoeld, niet noodzakelijk maakt.

Gelijk ik echter in mijn evengenoemd schrijven reeds te kennen gaf, bestaat mijnerzijds tegen eene zoodanige aanvulling ook geen bezwaar.

Bij de aanstaande herziening van het Gemeentekiesrecht zal de noodige aandacht aan deze zaak worden geschonken.

Sumber: Ag. 10326/1925; GB. Tzg.Ag. 15421/1925.

Abstraksi :

5.16 Surat pengantar dari Ajun Penasehat Desentralisasi, mengenai Surat Walikota Kotapraja Medan tanggal 8 Mei 1925 No. 6147/D

Ajun Penasihat kepada Gubernur Sumatra Timur memberitahukan adanya telegram pemerintah kepada Walikota Medan tanggal 23 Maret 1925 No. 275/II, bahwa perubahan artikel 2 lid 1 sub c dari peraturan pemilihan seperti yang dimaksud oleh Mackay, tidak perlu pada pembaharuan pemilihan Dewan Kotapraja yang akan diadakan, akan memberikan perhatian penuh.

5.17. *Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 9 Mei 1924*

Blijkens zijn advies van 15 Juni 1923 no. IV kon de Raad zich toenmaals geheel vereenigen met de voorstellen van den Adviseur voor de decentralisatie tot wijziging van het kiesrecht voor de gemeenteraden. Deze voorstellen hadden de strekking om : 1e. Met afschaffing van den census het kiesrecht toe te kennen aan hen die in eenige belasting zijn aangeslagen en zich persoonlijk schriftelijk voor plaatsing op de kiezerlijst aanmelden; 2e. Aan de vrouw het kiesrecht te verleen; 3e. Het kiezercorps groepsgewijze aan de verkiezing te doen deelnemen in dien zin dat elke kiezer allen kiest de raadsleden tot welker groep bij behoort.

Sumber : Kl. 25 Maret 1924 No. 6534; Bgs. 5 Juni 1924 No. 1315 B/II; GB. Tzg.ag. 15421/1925.

Abstraksi :

5.17 *Saran dari Dewan Hindia Belanda ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapatnya tanggal 9 Mei 1924.*

Dewan Hindia Belanda memberikan usul berdasarkan rapat tanggal 9 Mei 1924 mengenai perubahan pemilihan anggota Dewan Kotapraja. Ada beberapa tujuan dari usul ini yaitu:

- Memberikan hak pilih bagi wanita
- Masing-masing pemilih hanya memilih anggota dewan yang termasuk kelompoknya
- Jumlah anggota dewan akan ditentukan oleh suatu

peraturan, demikian juga pembagian kelompok penduduk.

5.18. Surat Keputusan Ratu Wilhelmina tentang Desentralisasi tahun 1923 diperbaiki kembali 4 Oktober 1924 No. 12

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAN.

Artikel 1.

Het Decentralisatie-Besluit, laatstelijk gewijzigd bij ons besluit van 12 Maart 1923, No 75 (Indisch Staatsbad No. 249), ondergaat de volgende wijzigingen:

A. Artikel 1, zooals dat luidt ingevolge ons besluit van 26 Juni 1918 No. 74 (Indisch Staatsblad No. 592), wordt gelezen als volgt :

(1) De raden zijn samengesteld uit :

a. Onderdanen-Nederlanders;

b. Onderdanen - niet - Nederlanders van inheemschen oorsprong;

c. Onderdanen - niet - Nederlanders van vreemden oorsprong.

(2) Waar een dezen bevolkingsgroepen niet in voldoende aantal aanwezig is, kan met betrekking tot die groep van het voorschrift in het eerste lid worden afgeweken.

(3) Het aantal raadsleden, zoomede de verdeeling van dit aantal over de bevolkingsgroepen, worden voor elken raad bij ordonnantie geregeld.

- B. Artikel 5, zooals dat luidt ingevolge ons besluit van 6 November 1916 No. 39 (Indisch Staatsblad 1917 No. 43) wordt gelezen volgt ;

Bij de regeling van de vereischten voor de bevoegdheid tot verkiezing van raadsleden wordt in acht genomen, dat personen, om voor kiesbevoegdheid in aanmerking te komen, Nederlandsch onderdaan moeten zijn.

Artikel 2.

De datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt bepaald door den Gouverneur-Generaal. Onze Minister van Kolonien is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Sumber : Bt. 27 Nopember 1924 No. 5; G.B. Tzg. ag. 15421/1925.

Abstraksi :

5.18 Surat Keputusan Ratu Wilhelmina tentang Desentralisasi tahun 1923 diperbaiki kembali 4 Oktober 1924 No. 12

Telah dimengerti bahwa pada artikel 1 **Surat Keputusan tentang Desentralisasi** , dibaca sebagai berikut :

Anggota dewan terdiri dari ;

- a. Orang-orang Belanda
- b. Orang-orang bukan Belanda asli pribumi
- c. Orang-orang bukan Belanda asli asing

Kelompok ini tidak mencapai jumlah yang seharusnya.

Jumlah anggota dewan dan pembagian jumlah kelompok penduduk akan disusun oleh masing-masing dewan melalui sebuah peraturan. (Penetapan) tanggal dari berlakunya surat keputusan ini ditentukan oleh Gubernur Jenderal.

5.19. Mosi dari perkumpulan Budi Utomo di Solo ditujukan kepada Gubernur Jenderal, dalam rapat terbuka tanggal 13 Oktober 1923.

Het Hoofdbestuur der vereeniging Boedi Oetomo met afgevaardigden van Verschillende afdeelingen dier vereeniging in openbare vergadering bijeen op 13 October 1923 te Solo.

Gezien het ontwerp verordening voor een nieuw kiesstelsel voor den Volksraad dat bereids door dit College is aangenomen op zijn vergadering van 17 Juli 1923. Gehoord de ter zake gevoerde debatten.

Overwegende dat dit nadeel voor een goed deel te coupeeren is door verbetering van het kiesstelsel voor den gemeenteraad, in gewijzigd, zoodanig, dat een meer uitgebreid aantal kiezers worden dier voege, dat verschillende bepalingen worden/verkregen en voorts meerdere Inlanders als leden van raad kunnen worden verzaken.

B e s l u i t

bij de Regeering er op aan te dringen de motie, aangenomen door Boedi Oetomo op haar vergadering van 24 December 1921 alsnog in ernstige overweging te willen nemen, in het bijzonder wat betreft de herziening van het kiesstelsel en de samenstelling van de gemeenteraden.

Sumber : Kl. 20 April 1922 No. 2566; Bgs. 6 Juni 1922 No. 1579; G.B. Tzg.Ag 15421/1925.

Abstraksi :

5.19 Mosi dari Perkumpulan Budi Utomo di Solo ditujukan kepada Gubernur Jenderal dalam rapat terbuka 13 Oktober 1923.

Pimpinan perkumpulan Boedi Oetomo beserta para pimpinan berbagai cabang telah mengadakan rapat terbuka di Solo pada 13 Oktober 1923. Pokok perdebatan dalam rapat itu membahas peraturan pemerintah tentang aturan pemilihan untuk anggota **Volksraad**. Dari debat itu diperoleh suatu kesepakatan bahwa berpegang pada pembagian kelompok pemilih, perlu adanya pertimbangan politik untuk kepentingan praktis karena sekarang sulit untuk mendapat data yang akurat berbagai aliran yang tumbuh di masyarakat baik dari kelompok pribumi maupun Eropa sebagai dasar pemilihan **Volksraad**.

Untuk itu semua anggota Boedi Oetomo mengajukan mosi kepada pemerintah yang diputuskan dalam rapatnya terdahulu 24 Desember 1921 tentang perbaikan aturan pemilihan serta pembentukan Dewan Kotapraja (**gemeenteraden**).

DAFTAR PUSTAKA

Djanoearto, SH., **Sedjarah Ketatanegaraan Republik Indonesia**. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1966.

Lekerkerker, C., **Land en Volk van Java eerste & Tweede Deel. Inleiding en Algemeene Beschrijving**. Batavia : J.B. Wolter Maatschappij, 1938.

Mangkudilaga, Machfudi, **Ichdisar Tata Negara Republik Indonesia**. Jakarta : Arsip Nasional, 1980.

Pamudji, Soeparni, **Pelaksanaan Azas Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Jakarta : Yayasan Karya Dharma, 1984.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)**. Jakarta : 1992.

Soejitno, Irawan, **Sedjarah Pemerintahan Daerah di Indonesia I & II**. Jakarta : Pradnya Paramita, 1984.

The Liang Gie, **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia**. Jakarta : Gunung Agung, 1996.

Wajong, J., **Kedudukan Dan Tugas Pamong Pradja**. Jakarta : Ichtiar, 1966.

Wolhoff, Prof. Drs. E.J., **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia**. Jakarta : Timun Mas, 1950.

